

**IDEOLOGI DAN GERAKAN POLITIK KAMMI DI UNESA
(Studi Analisis Siyasa Syar'iyah)**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Guna Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan
Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syari'ah**

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS K S-2007 029 SJ	No. REG : S-2007 / SJ / 029 ASAL PUKU: TANGGAL : Oleh :

**MARNAHUM
NIM : C03302004**



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARI'AH
JURUSAN SIYASAH JINAYAH
SURABAYA
2007**

Gajah Belang
- Jl. Jember Welahan Labri No. 24 W 33 - 6930407,
- Gajah Belang No. 5 W 031 - 6933789

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Marnahum ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasakan.

Surabaya, 24 Februari 2007

Pembimbing,



Drs. H. Ahmad Faishol Haq, M.Ag

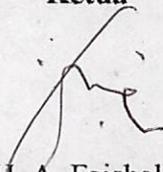
NIP.150207785

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh MARNAHUM ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel pada hari Rabu, Tanggal 1 Agustus 2007, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu Syari'ah.

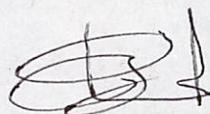
Majelis Munaqasah Skripsi

Ketua



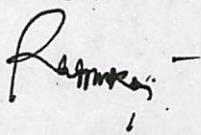
Drs. H. A. Faishal Haq, M.Ag
NIP : 150 207 785

Sekretaris



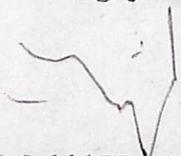
H. Muhammad Arif, MA
NIP : 150 321 632

Penguji I,



Drs. H. Akh. Mukarram, M.Hum
NIP : 150 226 189

Penguji II



H. Sahid HM, M.Ag
NIP: 150 275 951

Pembimbing



Drs. H. A. Faishal Haq, M. Ag
NIP : 150 207 785

Surabaya, 1 Agustus 2007
Mengesahkan,
Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Drs. H. Abd. Salam, M.Ag
NIP. 150 221 203

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil studi kajian lapangan untuk menjawab **IDEOLOGI DAN GERAKAN POLITIK KAMMI DI UNESA (Studi Analisis Siyasah Syar'iyah)** dengan rumusan masalah; 1) Bagaimana corak ideologi dan gerakan politik KAMMI di UNESA? 2) Bagaimana deskripsi siyasah dalam gerakan politik KAMMI di UNESA ? 3) Bagaimana ideologi dan gerakan politik KAMMI di UNESA.

Dalam penelitian ini lebih banyak mengungkapkan hal-hal yang empiris di lapangan, oleh karena itu metode penelitian yang di gunakan adalah metode peneliian kualitatif.

Dari hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa 1) Corak ideologi dan gerakan politik KAMMI di UNESA sebagai organ perjuangan mahasiswa, idealisme KAMMI di tuangkan dalam visi dan misi organisasi, bahwa KAMMI adalah wadah perjuangan permanen yang akan melahirkan kader-kader pemimpin masa depan yang tangguh dalam upaya mewujudkan masyarakat Islam di Indonesia, dan menurut KAMMI, Masyarakat Madani merupakan suatu bentuk masyarakat ideal yang mesti di wujudkan juga di Indonesia. 2) Diskripsi Siyasah dalam gerakan politik KAMMI di UNESA, ini sangat jelas bahwa KAMMI meyakini sepenuhnya hukum yang ditetapkan Allah SWT, bahwa kemenangan Islam adalah suatu kepastian dan sebuah aksioma dalam kamus perjuangan umat. Untuk itu KAMMI juga meyakini bahwa sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat bagi mereka yang berjihad dan berkorban dengan ikhlas. 3) Ideologi dan gerakan politik KAMMI di UNESA dalam politik Islam di Indonesia ini mewujudkan bahwa gerakan reformasi mampu memberikan efektivitas tekanan dan ketepatan gagasannya untuk menggerakkan reformasi maupun pemerintahan supaya bisa berjalan dengan benar dan tepat, dan misi KAMMI yang pertama, menjadikan pelopor, perekat; untuk proses perubahan dan. yang kedua, memberikan pelayanan. dan yang ketiga, memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.

Saran: Kepada KAMMI kami sarankan untuk tetap memperhatikan kondisi ranah perpolitikan di Indonesia terutama dalam pergerakan di bidang pembaharuan Islam dan pendidikan.

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS	No. REG : S-2007/SJ/029
	ASAL PUKU:
	TANGGAL :
DAFTAR ISI	

SAMPUL DALAM	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TRANSLITERASI	ix
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Hasil Penelitian	9
E. Definisi Operasional.....	9
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II : LANDASAN TEORI TENTANG SIYASAH SYAR'YAH.....	16
A. Pengertian Siyasah Syar'iyah	16
B. Ruang Lingkup Dan Kajian Siyasah	22
1. Ruang Lingkup Siyasah	22
2. Sumber Kajian Siyasah	24
C. Pendekatan Kajian Siyasah	24
D. Perkembangan Siyasah Syar'iyah	28
1. Periode Klasik	31
2. Periode Pertengahan	34
3. Periode Modern	37

BAB III : IDEOLOGI DAN PERGERAKAN POLITIK KAMMI	39
A. Sejarah KAMMI.....	39
B. Ideologi	48
C. Pergerakan KAMMI di UNESA	55
D. Peran KAMMI Dalam Perpolitikan Di Indonesia.....	57
BAB IV : ANALISIS IDEOLOGI DAN GERAKAN POLITIK KAMMI	
TERHADAP SIYASAH SYAR'YAH	72
A. Tinjauan Siyasah Syar'iyah Terhadap Corak Ideologi KAMMI ..	72
B. Tinjauan Siyasah Syar'iyah Terhadap Politik KAMMI	
di UNESA	79
BAB V : PENUTUP	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran	82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era tahun 90-an, dapat dikatakan sebagai *renaisans* bagi gerakan mahasiswa. Menurut Eep Saefullah Fatah,¹ ada beberapa kondisi yang melatarbelakangi bergairahnya kembali gerakan mahasiswa yang sebelumnya lama dalam keadaan tiarap akibat represi rezim. *Pertama*, akses dari karakter pendidikan politik yang tertutup dan kurang dialogis. Karakter pendidikan semacam ini merupakan lahan yang subur bagi tumbuhnya ketidakpuasan dan kekecewaan politik di kalangan kaum muda dan mahasiswa. *Kedua*, akses dari politik pembangunan Orde Baru. Politik Pembangunan merupakan lahan yang subur bagi tumbuhnya banyak pertanyaan tentang ketidakadilan. Kaum muda dan mahasiswa yang peduli terhadap kelompok masyarakat yang terpinggirkan akibat politik pembangunan terus melakukan kajian secara aktif dan intensif, turun ke jalan dan meneriakkan perlunya demokrasi ditumbuhkan. *Ketiga*, kegelisahan mahasiswa melihat kehendak stabilisasi politik dan ekonomi Orde Baru yang begitu kuat dan menuntut biaya sosial yang besar. Di tengah situasi seperti inilah, mahasiswa dipaksa untuk berpikir dan bersikap kritis terhadap kebijakan tersebut.

¹ Eep Saefullah Fatah, *Catatan Atas Gagalnya Politik Orde Baru*, (Yogyakarta: 1998), h.276-378

Ketiga faktor di atas mendorong munculnya berbagai kelompok studi, kelompok aksi yang menghimpun aspirasi politik mahasiswa, dan berbagai LSM generasi keempat yang digerakkan oleh kalangan muda pro-demokrasi. Pada era ini juga mahasiswa – terutama di kampus-kampus “sekuler” seperti UI, ITB, IPB, dan UGM – bertemu kembali dengan ruh ideologinya, khususnya Islam. Ruh ideologis inilah yang mendorong mahasiswa di penghujung era 80-an berdemonstrasi besar-besaran menentang perjudian massal yang dilegalisasikan (SDSB), dan penolakan larangan menggunakan jilbab di sekolah atau kampus.

Dalam sejarah politik Indonesia, gerakan mahasiswa tahun 1997/1998 adalah yang paling menonjol menentang kekuasaan presiden Soeharto.² Bermula menuntut demokratisasi, penegakan HAM, pelaksanaan reformasi total, hingga meningkat pada pengunduran diri Soeharto dari jabatan presiden. Dari penghujung 1997 sampai Mei 1998, hampir setiap pekan terjadi gelombang demonstrasi dari berbagai elemen atau kelompok mahasiswa di berbagai kota besar. Bentuk dan pola aksinya pun beragam, seperti demonstrasi, mimbar bebas, dialog, audiensi, petisi, seminar, pawai, dan sebagainya.

Hal lain yang menjadi karakteristik gerakan mahasiswa 1998 adalah sifatnya yang berawal dari “kelompok aksi”. Berbeda dengan fase-fase sebelumnya, dimana gerakan mahasiswa Indonesia diwarnai oleh berbagai ormas kemahasiswaan seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Gerakan

² Harahap Muchtar, *Gerakan Mahasiswa dan Politik Indonesia*, (Jakarta: 1999), h. 9

Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Persatuan Mahasiswa Kristen Republik Indonesia (PMKRI), dan lainnya, gerakan mahasiswa 1998 diwarnai dengan kemunculan kelompok-kelompok aksi. Kelompok aksi ini memiliki keberagaman basis ideologi dan pengorganisasian gerakan. Kemunculan mereka sebagai kelompok aksi tidak lepas dari iklim politik kampus yang berkembang pasca NKK/BKK. Prasetyantoko³ - misalnya - mengelompokkan mereka ke dalam kelompok aksi berbasis agama (KAMMI, HAMMAS, dan lainnya), kelompok aksi mahasiswa berbasis sekuler (FORKOT, FAMRED, dan lainnya), dan kelompok aksi mahasiswa dengan garis politik dan pengorganisasian ketat (KOMRAD dan LMND).

Politik Islam tidak bisa dilepaskan dari sejarah Islam yang multi interpretatif semacam ini. Pada sisi lain, hampir setiap orang Islam percaya akan pentingnya prinsip-prinsip Islam dalam kehidupan politik. Pada saat yang sama, karena sifat Islam yang multi interpretatif itu tidak pernah ada pandangan tunggal mengenai bagaimana seharusnya Islam dan politik dikaitkan secara pas.

Bahkan, sejauh yang dapat ditangkap dari perjalanan diskursus intelektual dan historis pemikiran dan praktek politik Islam ada banyak pendapat yang berbeda-beda bahkan saling bertentangan mengenai hubungan yang sesuai antara Islam dan politik.⁴

³ Prasetyantoko, *Gerakan Mahasiswa dan Demokrasi di Indonesia*, (Jakarta: 2001), h. 9

⁴ M. Din Syamsuddin, *Islam dan Politik*, xiv

Di Indonesia negara dunia ketiga sekaligus negeri dengan penganut Islam terbesar, proses modernisasi dalam berbagai lapangan kehidupan khususnya politik dilakukan dengan sangat efektif oleh kekuasaan pemerintah Orde Baru. Orientasi pembangunan politik Orde Baru menghendaki terciptanya sistem yang kuat, stabil dan demokratis pasca kegagalan Orde Lama. Dalam batasan tersebut modernisasi politik kemudian dilirik sebagai “resep mujarab” untuk mewujudkan suasana politik yang sehat dan berguna bagi proses demokratisasi.

Modernisasi politik yang dimaksud, menurut Huntington⁵, mempunyai tiga pengertian. Pertama, melibatkan rasionalisasi otoritas, dengan mengganti sejumlah sumber otoritas politik tradisional, keagamaan, kekeluargaan, dan etnik dengan otoritas politik yang benar-benar sekular dengan bendera kebangsaan. Kedua, diferensiasi fungsi-fungsi politik baru dan pembangunan struktur yang menekankan aspek-aspek pengkhususan agar lebih berfungsi. Ketiga, meningkatkan partisipasi politik bagi kelompok sosial seluruh rakyat.

Dalam kasus Orde Baru, para pengamat pada umumnya bersepakat bahwa proses modernisasi yang berlangsung di bawah Orde Baru telah mendorong dilakukannya upaya-upaya penafsiran ulang dan penyelesaian diri dalam tubuh umat Islam, sehingga mereka setidaknya tetap dapat eksis dalam gejolak perubahan yang berlangsung. Ini terutama dirasakan dalam wacana dan kiprah politik yang telah sejak dini mengagendakan dan melancarkan restrukturisasi

⁵ Ali Said Damanik, *Fenomena Partai Keadilan Transformasi, 20 TH Gerakan Tarbiah Indonewsia*, (Jakarta: Terahu, 2002), h. 11

mendasar yang kemudian dipergunakan untuk menopang proses akselerasi modernisasi dan pembangunan ekonomi.

Hikam mencatat, restrukturisasi politik yang dilakukan oleh Orde Baru telah menghasilkan sebuah format politik baru yang ciri-ciri umumnya adalah: 1) Munculnya negara sebagai aktor atau agen otonom yang posisinya “mengatasi” (baca: berposisi di atas) masyarakat yang sebetulnya merupakan asal-usul eksistensinya, 2) Menonjolnya peran dan fungsi birokrasi serta teknorasi dalam proses rekayasa sosial, ekonomi dan politik, 3) Semakin terpinggirkannya sektor-sektor populer dalam masyarakat termasuk kaum intelektual, 4) Diterapkannya model politik eksklusiver melalui jaringan korporatis untuk menangani berbagai kepentingan politik, dan 5) Penggunaan efektif hegemoni ideologi untuk memperkokoh dan melestarikan legitimasi sistem politik yang ada.⁶

Dalam perkembangan lebih lanjut, gerakan ini mengalami banyak perubahan, perubahan tersebut tidak harus menyentuh aspek substansi atau nilai dan pendekatan gerakannya saja, tetapi juga pada aspek legal formalnya. Nama *usrah*, yang diawal-awal demikian populer dan dijadikan untuk setiap kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa dalam kegiatan pengajian terbatas mereka, mulai ditinggalkan. Kata *usrah* itu kemudian malah mengalami “pembusukan makna”, karena terdengar seperti mengandung arti subyersi, dengan kerahasiaan gerakan dan eksklusivismenya.⁷ Ini bukannya tanpa sebab, gerakan yang dilakukan Imron

⁶ Muhammad AS Hikam, *Demokrasi dan civil Societai*, (Jakarta: PA3ES, 1999), h. 218

⁷ Kunto Wijoyo, *Paradigma Islam; Interpretasi Untuk Aksi*, (Bandung: Mizan, 1993), h. 63

dengan Komando Jihadnya pada tahun 80-an adalah dari “membusuknya” istilah *usrah*. Imron dengan para pengikutnya rupanya dikenal sebagai *Aktifis Usrah*.

Dengan model kegiatan yang tidak jauh berbeda, pada pertengahan 80-an kegiatan-kegiatan keislaman dalam kelompok-kelompok kecil di kampus itu dikenal sebagai gerakan tarbiyah. Pada titik inilah, kelompok gerakan ini mendapatkan pengaruh yang sangat kuat dari sistem dan metodologi (Manhaj) dakwah yang dikembangkan oleh Ikhwanul Muslimin (disingkat dengan Ikhwan) di Mesir. Babak berikutnya, dalam tubuh gerakan ini terjadi perubahan secara besar-besaran seiring dengan semakin banyaknya ide-ide dan pemikiran tokoh-tokoh Ikhwan yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam tubuh gerakan ini, dalam buku ini dipotret dengan konsep “transformasi”, yang akan dijelaskan kemudian.

Lebih dari sebatas ide, pengaruh gerakan yang berkembang cepat dari ruang-ruang sempit seperti mushalla dan kamar-kamar kost mahasiswa itu membangun sebuah *mainstream* tersendiri. Simbol-simbol dari aktifitas gerakan ini mulai banyak bermunculan dari secara luas diterima publik, menggantikan simbol-simbol revolusioner ala revolusi Iran, seperti foto-foto Khomeini yang kala itu juga banyak di pajang di kamar-kamar kost mahasiswa. Secara masif gerakan ini memelopori pemakaian busana muslim di kalangan mahasiswi, yang dikenal sebagai jilbab. Arus deras gerakan ini pula yang memperkenalkan budaya-budaya baru yang sebelumnya tidak dikenal politik, seperti tradisi berkesenian *nasyid*, pemeliharaan janggut untuk kaum laki-laki dan sejenisnya.

Gerakan ini mendominasi model-model kegiatan keagamaan di kampus-kampus umum mulai pengetahuan 80-an sampai 90-an. Menjelang reformasi 1998, saat mahasiswa kembali bergejolak dengan berbagai aksi menuntut Presiden Soeharto mundur, gerakan dakwah kampus ini menunjukkan kekuatannya. Selain mendominasi lembaga-lembaga formil kemahasiswaan di kampus-kampus umum, seperti UI, ITB, IPB, dan UGM dan lain-lain, kader-kader gerakan dakwah ini mendirikan sebuah organisasi yang diberi nama Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI). Dengan format gerakan menggunakan sistem sel yang sebelumnya sukar untuk didefinisikan organisasi massa secara besar-besaran. Dalam salah satu aksi massanya, KAMMI berhasil mengumpulkan massa sampai 20.000 orang. Sebuah prestasi mobilisasi massa yang saat itu sulit untuk dilakukan oleh organ kemahasiswaan manapun.

Transformasi tersebut tidak berhenti sampai disitu. Pada momentum reformasi setelah Soeharto jatuh, tepatnya pada tanggal 09 Agustus 1998, gerakan dakwah ini melakukan langkah lebih berani untuk memunculkan dirinya ke hadapan publik, dengan mengumumkan secara legal formal sebagai kekuatan politik yang bernama Partai Keadilan (PK). Semenjak itu mulailah publik mengenal secara jelas siap sesungguhnya gerakan, yang dalam kurun lebih dari satu dasawarsa itu, membuat fenomena tersendiri. Apalagi setelah mereka tampil secara mengesankan sebagai partai yang masuk dalam *The Big Seven* partai

pemenang pemilu 1999 lalu, dan berhasil memincut hati masyarakat dengan aksi-aksi simpatiknya.⁸

Siyasah syar'iyah dalam mewujudkan Islam sebagai ajaran yang adil, memberikan makna bagi kehidupan dan menjadi rahmat bagi seluruh alam dan menerima dengan terbuka apa yang datang dari luar selama masalah bagi kehidupan umat, bahkan menjadi unsur yang bermanfaat yang akan menambah dinamika kehidupan serta menghindarkannya dari kekakuan dan kebekuan.⁹

Akan tetapi, siyasah juga akan menolak unsur-unsur luar yang akan menyimpangkannya dari tujuan dan keluar dari rambu-rambu syari'ah yang akan mengikis habis identitasnya. Hal ini dihadapi umat Islam di mana saja di dalam proses kehidupan di dunia yang terus berubah.¹⁰

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana corak ideologi dan gerakan politik KAMMI di UNESA ?
2. Bagaimana deskripsi siyasah dalam gerakan politik KAMMI di UNESA ?
3. Bagaimana ideologi dan gerakan politik KAMMI di UNESA ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini bertujuan untuk mengetahui :

1. Tentang ideologi KAMMI di UNESA

⁸ Ali Said Damanik, *Fenomena Partai Keadilan*, h. 17-19

⁹ H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*, h. vi

¹⁰ Ibid, h. vi-vii

2. Tentang gerakan politik KAMMI di UNESA
3. Mendeskripsikan sejauh mana gerakan politik KAMMI dalam perpolitikan Islam di Indonesia.

D. kegunaan hasil penelitian

1. Skripsi ini sebagai tambahan referensi studi tentang politik Islam di Indonesia
2. Sebagai tambahan discourse tentang politik Islam di Indonesia

E. Definisi operasional

Untuk menjelaskan konsep penelitian diatas dan guna membatasi lingkup penelitian ini, maka kami memberikan gambaran tentang operasionalisasi konsep sebagai berikut :

Ideologi : Sebuah konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberi arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup.

Gerakan politik : Suatu gerakan untuk melakukan perubahan politik dengan berpihak pada kekuatan politik tertentu.

1. KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia)

Adalah para aktifitas dakwah kampus selama 20 tahun aktifitasnya di LDK terus terjadi penguatan-penguatan visi keagamaan, intelektual dan juga politik ini melalui lembaran baru sejarah dakwahnya dengan menunjukkan peran serta tanggung jawab sosial politiknya terhadap masa depan bangsa Indonesia tercinta.

Sejarah kemudian mencatat KAMMI menoreh titik-titik besar dalam gambaran Indonesia yang sedang berubah sejak 1998 lalu.

Setidaknya ada 3 (tiga) titik penting yang melekat dalam gambar tersebut :

Pertama, tekanan politik yang besar yang diproduksinya secara nasional terhadap rezim Soeharto sejak 8 April hingga 20 Mei 1998. **Kedua**, eksistensi sebagian organ gerakan mahasiswa Islam yang *Out Standing* dan *Leading* di tengah-tengah kelesuan panjang ormas-ormas kemahasiswaan Islam ekstra kampus. **Ketiga**, performa handalnya sebagai demokrasi yang konsisten, pemimpin (visioner), dan sederhana (moderat).

Dengan pemaparan singkat diatas dapat dijelaskan bahwa penelitian dari judul skripsi ini ingin menguak tentang politik Islam di Indonesia yang dalam hal ini adalah KA MMI.

2. Siyasaḥ Syar'iyah

Yaitu ilmu yang mempelajari hal-hal dan seluk-beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syari'at Islam untuk mewujudkan kemaslahatan umat.

F. Metode Penelitian

Fokus pembahasan dalam penelitian ini lebih banyak mengungkap hal-hal yang empiris di lapangan. Karena itu metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif.

Metode penelitian ini dilatarbelakangi karena jenis penelitian itu memiliki kesesuaian dengan rumusan masalah yang akan dibahas. Sebagaimana yang dikatakan oleh Deddy Mulyana, untuk mengetahui perjalanan dan perkembangan sejarah organisasi sosial tertentu yang dilakukan di lapangan.

Selain alasan itu, penggunaan metode kualitatif juga karena skripsi ini ingin mendeskripsikan keadaan-keadaan dan konsep-konsep dalam sebuah kelompok, metode kualitatif dalam penelitian ini juga tidak akan meninggalkan teknik kepustakaan atau dokumenter sebagai bahan rujukan, setidaknya untuk masalah-masalah teori, pendeskripsiannya akan lebih tepat jika menggunakan riset kepustakaan untuk melengkapinya, kami paparkan beberapa berikut:

1. Data yang dikumpulkan

Dalam penelitian ini data yang perlu dikumpulkan terkait dengan siyasah syar'iyah dan ideologi serta gerakan politik KAMMI di UNESA yang meliputi waktu, tempat dan motivasi didirikannya.

2. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

- 1) Sumber data primer; yang dimaksud adalah AD/ART KAMMI dan tulisan-tulisan yang membahas tentang KAMMI diantaranya *KAMMI dan pergulatan reformasi*,
- 2) Sumber data sekunder; yang dimaksud disini adalah sumber-sumber tertulis lainnya, yang berfungsi untuk melengkapi sumber data primer. Sumber data ini berasal dari sumber data tertulis yang tidak ditulis oleh organisasi KAMMI yang memiliki relevansi dengan studi ini

Sumber data tokoh dilakukan dengan wawancara dengan ketua KAMMI di UNESA, sedangkan sumber data pustaka digali dengan melakukan kajian terhadap buku, dan dokumen-dokumen organisasi.

3. Populasi dan sampel

Dalam melakukan penelitian ini sampel dilakukan secara purposive (bertujuan), yakni memilih sampel berdasarkan pada penilaian tertentu secara logis dengan alasan unsur-unsur yang dipilih dianggap mewakili populasi, mengapa purposive ?

Karena teknik sampel ini berkesesuaian dengan jenis penelitian yang digunakan yakni kualitatif.

Penentuan populasi itu akan diprioritaskan kepada KAMMI yang ada di UNESA. Yang dimaksud adalah mereka yang masih duduk di dalam struktur organisasi KAMMI di UNESA.

Lebih lanjut dalam pengumpulan data yang dihimpun melalui interview, peneliti menggunakan teknik *Snow Balling*, yakni peneliti mewawancarai tokoh KAMMI yang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan.

4. Teknik pengumpulan data

Dalam melakukan inventarisir data, dua teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam studi ini, yakni:

a. Dokumenter

Dengan teknik dokumenter, peneliti akan mengumpulkan baik bersifat teoritis maupun empiris. Teknik ini utamanya untuk mendeskripsikan ideologi dan gerakan politik Islam di tanah air, khususnya di Indonesia. Data tersebut akan ditelusuri melalui beberapa sumber dan bahan pustaka seperti majalah, koran, dan terbitan-terbitan ilmiah lainnya.

b. Wawancara (interview)

Teknik wawancara ini digunakan untuk mengetahui tentang ideologi dan gerakan politik yang berkembang di lapangan.

Beberapa pokok pertanyaan yang kami berikan pada saat wawancara nanti terkait dengan:

1. Ideologi KAMMI di UNESA
2. Gerakan politik KAMMI di UNESA
3. Strategi gerakan KAMMI dalam siyasah syar'iyah

5. Teknik analisa data

Data yang berhasil dikumpulkan selama proses penelitian, baik yang berupa hasil riset pustaka maupun wawancara akan dianalisis dengan dua metode, yakni:

1. Deskriptif Analisis, yakni proses pengumpulan, pengelolaan, dan pemaparan data sehingga menjadi sebuah konfigurasi data yang deskriptif.
2. Induktif, yakni melakukan proses pembuktian secara ilmiah dari hal-hal atau masalah yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus.
3. Deduktif, yakni melakukan proses pembuktian secara ilmiah dari hal-hal atau masalah yang bersifat khusus ke hal-hal yang bersifat umum. Dan sebaliknya dalam bahasa sederhana penelitian ini akan dianalisis secara beriringan dengan dua metode tersebut untuk mendapatkan kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi ini terdiri dari lima bab dan disertai dengan sub-sub dan beberapa lampiran secara sistematis pembahasan skripsi ini yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada pendahuluan ini akan dijelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, definisi operasional, teknik analisis data dan sistematika pembahasan.

BAB II : STUDI TEORITIS MENGENAI SIYASAH SYAR'IYAH

Bab ini akan dideskripsikan mengenai siyasah syar'iyah dan perkembangannya yang ada dalam Islam.

BAB III : IDEOLOGI DAN PERKEMBANGAN POLITIK KAMMI

Bab ini mendeskripsikan sejarah, ideologi, dan perpolitikan KAMMI

BAB IV : ANALISIS DATA

Pada bab ini akan dilakukan analisis data terhadap hasil riset perpustakaan dan riset empiris di lapangan.

BAB V : PENUTUP

Sebagai ending dari sebuah penelitian, dalam bab ini peneliti mencoba memberikan kesimpulan akhir dan saran-saran yang perlu diberikan dalam proses penelitian ini.

BAB II

STUDI TEORITIS MENGENAI SIYASAH SYARI'YAH

A. Pengertian Siyasah Syar'iyah

Siyasah syar'iyah adalah merupakan batasan-batasan atas hak-hak dan kewajiban seorang pemimpin, disamping juga memaparkan secara rinci hak-hak dan kewajiban rakyat yang sepenuhnya berdasarkan ketentuan Allah dan Rasulnya.

Sesungguhnya siyasah syar'iyah merupakan dakwah manhajiah (seruan proporsional) yang terbaik dari hukum buatan manusia menuju pada hukum transidental ciptaan Allah SWT, yang di dalamnya merupakan rincian terhadap penerapan hukum ini dalam kehidupan manusia.

Hubungan agama dan politik selalu menjadi topik pembicaraan yang menarik, munculnya topik pembicaraan ini berpangkal dari permasalahan apakah kerasulan Muhammad mempunyai kaitan dengan masalah politik ? di kalangan umat ada pendapat Islam adalah agama komprehensif, di dalamnya terdapat sistem politik dan ketatanegaraan, sistem ekonomi, sistem sosial dan lain sebagainya.¹

Definisi ini lebih dipertegas lagi oleh Abdurrahman Taj yang merumuskan siyasah syar'iyah sebagai hukum-hukum yang mengatur kepentingan negara, mengorganisasi permasalahan umat sesuai dengan jiwa (semangat) syari'at dan dasar-dasar yang universal demi terciptanya tujuan-tujuan kemasyarakatan

¹ Ibnu Taimiyah, *Siyasah Syar'iyah, Etika Politik Islam*, h. viii

walaupun pengaturan tersebut tidak ditegaskan baik oleh Al-Qur'an maupun al-Sunnah.²

Siyasah syar'iyah merupakan perkataan Arab yang terdiri dari dua kata yaitu siyasah dan syar'iah yang mana perkataan yang kedua merupakan sifat kepada yang pertama, siyasah merupakan kata asal (masdar) bagi perbuatan maksudnya mengepalai disebuah masyarakat. Sedangkan syar'iyah merupakan perkataan yang dikembalikan kepada syara' yang bermana jalan. Akan tetapi perkataan ini lebih tertumpu pada segala apa yang di syari'atkan oleh Allah melalui Rosulnya seperti: aqidah, akhlak, dan hukum-hukum dalam kehidupan.³

Bahansi merumuskan bahwa siyasah syar'iyah adalah pengaturan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan tuntunan syara'. Sementara para fuqaha', sebagaimana dikutip Khallaf, mendefinisikan siyasah syar'iyah sebagai kewenangan, penguasa pemerintah untuk melakukan kebijakan-kebijakan politik yang mengacu kepada kemaslahatan melalui peraturan yang tidak bertentangan dengan dasar-dasar agama, walaupun tidak terdapat dalil yang khusus untuk itu.⁴

Para ulama mengemukakan dua 'Ta'rif siyasah syar'iyah

1. Ta'rif Am

Ta'rif ini menjelaskan semua aspek peraturan dan undang-undang yang berkaitan dengan lembaga, pelaksana dan kehakiman termasuk juga urusan-urusan kelembagaan, soal dalam dan luar negeri.

² Muhammad Iqbal *Fiqh Siyasah*, Radar Jaya Pratama Jakarta 2001.hal.5

³ Abdul Aziz Hanafi, *Siyasah Syari'ah dan pelaksanaanya*

⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, hal.5-6

2. Ta'rif Khas

Ta'rif ini diartikan sebagai suatu hukum yang agak keras yang dipetik dari pada dalil-dalil yang *ijmaliah* sekiranya hukum fiqh tidak dapat mencapai maklumat dimana hukum serupa itu disyari'atkan.⁵

Definisi-definisi yang dikemukakan para ahli di atas dapat ditemukan hakikat siyasah syar'iyah, ya itu:

1. Bahwa siyasah syar'iyah berhubung dengan pengurusan dan pengaturan kehidupan manusia;
2. Bahwa pengurusan dan pengaturan ini dilakukan oleh pemegang kekuasaan (*ulu al-amr*);
3. Bahwa tujuan pengaturan tersebut adalah untuk menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudlaratan (*al-b al-masalih wa daf al-mafasid*);
4. Bahwa pengaturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan ruh atau semangat syari'at Islam yang universal.

Berdasarkan hakikat siyasah syar'iyah ini dapat disimpulkan bahwa sumber-sumber pokok siyasah syar'iyah adalah wahyu Al-Qur'an dan al-Sunnah. Kedua sumber inilah yang menjadi acuan bagi pemegang pemerintahan untuk menciptakan peraturan-peraturan perundang-undangan dan mengatur kehidupan bernegara. Namun karena kedua sumber tersebut sangat terbatas,

⁵ Abdul Aziz Hanafi, *Tarbiyah siyasah syar'iyah dalam pelaksanaannya*.

sedangkan perkembangan kemasyarakatan selalu dinamis, maka sumber atau acuan untuk menciptakan perundang-undangan juga terdapat pada manusia dan lingkungannya sendiri. Sumber-sumber ini dapat berupa pendapat para ahli, yurisprudensi, adat istiadat masyarakat yang bersangkutan, pengalaman dan warisan budaya.⁶

Akan tetapi sumber-sumber yang tidak berasal dari wahyu tersebut (yang disebut juga dengan *siyasah wadl'iyah*) harus diseleksi dan diukur dengan kerangka wahyu. Kalau ternyata bertentangan atau tidak sejalan dengan semangat wahyu, maka kebijaksanaan politik yang dibuat tersebut tidak dapat dikatakan sebagai *siyasah syar'iyah* dan tidak boleh diikuti, sebagaimana ditegaskan dalam sabda Rasulullah Saw. *La ta'ata li makh-luqin fi ma'siyatillah* (Tidak ada ketepatan kepada makhluk dalam hal melakukan maksiat kepada Allah).

Sebaliknya, kalau sesuai dengan semangat kemaslahatan dan jiwa syari'at maka kebijaksanaan dan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh penguasa tersebut wajib dipatuhi dan diikuti. Hal ini sesuai dengan firman Allah QS. al-Nisa', 4:59:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِيَ الْاَمْرِ مِنْكُمْ

"Wahai orang-orang yang beriman taatilah Allah taatilah Rasul-Nya dan para pemimpin di antara kamu".⁷

⁶ Ahmad Sukardja, Piagam Madinah dan undang-undang 1945 Jakarta, UI Press 1995 hal. 11

⁷ Ayat ini mengisyaratkan bahwa kepatuhan kepada Allah dan Rasulnya adalah mutlak, kata *athi'u* yang mendahului kata Allah dan Rasulnya, sedangkan kepada Ulu al Amr bersifat relatif sejauh tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Sekarang timbul permasalahan. Bagaimana mengukur bahwa suatu kebijakan politik yang dikeluarkan pemegang kekuasaan sesuai dengan semangat syari'at? Dengan kata lain, bagaimana *siyasah wad'iyah* yang bersumber dari manusia dan lingkungannya itu menjadi bagian dari *siyasah syar'iyah*? Untuk mengukurnya, setidaknya perlu diperhatikan prosedur dan substansi dari kebijakan tersebut. Dari segi prosedur, pembuatan peraturan perundang-undangan tersebut harus dilakukan secara musyawarah, sebagaimana diperintahkan Allah dalam surat Ali 'Imran, 3:159 dan al-Syura, 42:38. Sedangkan dari segi substansinya harus memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:

1. Sesuai dan tidak bertentangan dengan syari'at Islam;
2. Meletakkan persamaan (*al-musawah*) kedudukan manusia di depan hukum dan pemerintahan;
3. Tidak memberatkan masyarakat yang akan melaksanakannya (*'adam al-haraj*);
4. Menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat (*tahqiq al-'adalah*);
5. Menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudlaratan (*jalb al-masalih wa daf al-mafasid*)⁸.

Jika diringkas, maka suatu kebijaksanaan politik dalam sebuah negara dapat menjadi *siyasah syar'iyah* bila sesuai dengan prinsip-prinsip syari'at Islam dan menghargai hak-hak manusia yang paling asasi.

⁸ Ibid hal.12

Ilustrasi ini secara implisit menunjukkan bahwa antara Fiqh Siyasah dan siyasah syar'iyah terdapat hubungan yang erat sekali, meskipun di antara keduanya memiliki perbedaan. Fiqh Siyasah merupakan bagian dari siyasah syar'iyah yang memberikan kontribusi berharga bagi pembuatan undang-undang dalam suatu negara agar sesuai dengan prinsip-prinsip dasar syari'ah. Meskipun tidak semua pandangan pemikir politik Islam yang tertuang dalam Fiqh Siyasah harus diterapkan dan dilaksanakan oleh suatu pemerintahan. Untuk memberi perbedaan antara keduanya, dapat diungkapkan bahwa Fiqh Siyasah lebih menjurus pada pemikiran-pemikiran ulama yang bersifat teoritis, sedangkan siyasah syar'iyah merupakan hasil keputusan politik pemegang pemerintahan yang bersifat praktis dan aplikatif dalam menciptakan kemaslahatan bagi rakyatnya.

Dalam sejarah Islam pun terjadi bahwa di antara pemikir fiqh siyasah ada juga yang langsung terjun ke dalam pemerintahan dan bergelut di bidang politik praktis, seperti al-Mawardi (975-1059 M) dan Ibn Khaldun 1332-1406 M). Namun tidak sedikit pula pemikir yang hanya mengemukakan teori politik tanpa terlibat jauh dalam lapangan politik praktis, seperti diperlihatkan oleh al-Farabi (870-950 M) dan Ibn Taimiyah (1263-1329M).⁹

⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, Radar Jaya Pratama, Jakarta, 2001 hal.7-8

B. Ruang Lingkup Dan Sumber Kajian Siyasah

1. Ruang Lingkup Siyasah

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ruang lingkup kajian siyasah. Di antaranya ada yang menetapkan lima bidang. Namun ada pula yang menetapkannya kepada empat atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian siyasah menjadi delapan bidang. Namun perbedaan ini sebenarnya tidak terlalu prinsip, karena hanya bersifat teknis.

Menurut al-Mawardi, ruang lingkup kajian siyasah mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (*siyasah dusturiyah*), ekonomi dan moneter (*siyasah maliyah*), peradilan (*siyasah qadha'iyah*), hukum perang (*siyasah harbiyah*) dan administrasi negara (*siyasah idariyah*). Sedangkan Ibn Taimiyah meringkasnya menjadi empat bidang kajian, yaitu peradilan, administrasi negara, moneter serta hubungan internasional. Sementara Abdul Wahhab Khallaf lebih mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja yaitu peradilan, hubungan internasional dan keuangan negara.¹⁰

Berbeda dengan tiga pemikir di atas, T.M. Hasbi malah membagi ruang lingkup siyasah menjadi delapan bidang, yaitu politik pembuatan perundang-undangan, politik, hukum, politik peradilan, politik moneter/ekonomi, politik administrasi, politik hubungan internasional politik pelaksanaan perundang-

¹⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, Radar Jaya Pratama, Jakarta, 2001 hal.13

undangan dan politik peperangan.¹¹

Berdasarkan perbedaan pendapat di atas, pembagian siyasah dapat disederhanakan menjadi tiga bagian pokok.

Pertama, politik perundang-undangan (*al-siyasah al-dusturiyah*). Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*tasyri'iyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*qudha'iyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*idariyah*) oleh birokrasi atau eksekutif.

Kedua, politik luar negeri (*al-siyasah al-kharijiyah*). Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga negara muslim dengan warga negara non-muslim yang berbeda kebangsaan (*al-siyasah al-duali al-khash*) atau disebut juga hukum perdata internasional dan hubungan diplomatik antara negara muslim dan negara non-muslim (*al-siyasah al-duali al-'am*) atau disebut juga dengan hubungan internasional.

Ketiga, politik keuangan dan moneter (*al-siyasah al-maliyah*). Permasalahan yang termasuk dalam *siyasah maliyah* ini adalah sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan atau hak-hak publik, pajak dan perbankan.

¹¹ T.M. Hasbi ash-Siddieqy, *Pengantar Siyasah Syar'iyah*, Yogyakarta : Madah t. tp. Hal.8

2. Sumber Kajian Siyasah

Setiap disiplin ilmu mempunyai sumber-sumber dalam pengkajiannya. Dari sumber-sumber ini disiplin ilmu tersebut dapat berkembang sesuai dengan tuntutan dan tantangan zaman. Secara garis besar, sumber siyasah dapat dibagi menjadi sumber primer dan sumber sekunder. Fathiyah al-Nabrawi membagi sumber-sumber siyasah kepada tiga bagian, yaitu Al-Qur'an dan sunnah, sumber-sumber tertulis selain Al-Qur'an dan sunnah, serta sumber-sumber yang berupa peninggalan kaum muslimin terdahulu.¹²

Selain sumber Al-Qur'an dan sunnah, Ahmad Sukardja mengungkapkan sumber kajian siyasah berasal dari manusia itu sendiri dan lingkungannya, seperti pandangan para pakar politik, 'urf atau kebiasaan masyarakat yang bersangkutan, adat istiadat setempat, pengalaman masa lalu dan aturan-aturan yang pernah dibuat sebelumnya.¹³

C. Pendekatan Kajian Siyasah

obyek kajian siyasah adalah tentang hubungan antara pemerintah dan rakyatnya dalam upaya menciptakan kesejahteraan dan kemaslahatan bersama. Hubungan ini meliputi masalah-masalah kebijaksanaan perundang-undangan, hubungan luar negeri dalam masa damai dan perang serta

¹² Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah*, Radar Jaya Pratama, Jakarta, 2001 hal.13-14

¹³ Ahmad Sukardjo, *Piagam Madinah dan Undang-undang*, Jakarta UI Press 1995, hal.11

kebijaksanaan keuangan dan moneter. Sebagai suatu cabang ilmu yang berdiri sendiri, kajian siyasah tentu memiliki metodologi dan pendekatan ilmiah. Di samping itu, metode dan pendekatan ini juga akan menjadi acuan serta kerangka untuk merumuskan keputusan-keputusan politik masa kini, sehingga bisa mengantisipasi setiap permasalahan yang berkembang di dunia Islam.¹⁴

Sedangkan kaidah-kaidah fiqh yang dapat dijadikan sebagai pola untuk menentukan berbagai kebijaksanaan politik antara lain adalah:

لا يَنكُرُ تَغْيِيرَ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الزَّمَانِ

*Tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan hukum terjadi karena perubahan zaman*¹⁵,

Berdasarkan kaidah ini pemerintah Islam dapat mengubah kebijaksanaan atau undang-undang sebelumnya, bila ternyata tidak lagi sesuai dengan tuntutan perkembangan masyarakat. Dalam konteks Indonesia, umpamanya, sebagian pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 ada yang tidak mencerminkan semangat perkembangan zaman dan reformasi, sehingga harus diamandemen.

التصريف على الرعية منوط بالمصلحة

*Tindakan imam (kepala negara) atas rakyatnya harus sesuai dengan kemaslahatan.*¹⁶

Kaidah ini mengandung arti bahwa apa pun kebijaksanaan pemerintah

¹⁴ J Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah Dan Pemikiran*, Jakarta, rajawali Press 1997. hal.29

¹⁵ Ali Ahmad al-Nadwi, *Al-Qowaid Al-Fiqhiyah*, Damasqus: Dar Al-Qalam, hal.65

¹⁶ H. Muchlis Usman, *Kaidah Kaidah Ushuliyah dan fiqhiyah*, hal.150

harus mempertimbangkan aspirasi rakyatnya. Sebab, kalau aspirasi rakyat tersebut tidak diperhatikan, maka keputusan pemerintah tidak akan efektif berlaku. Dalam hal ini, pemerintah tidak boleh menciptakan suatu peraturan perundang-undangan yang merugikan rakyat. Karena itu, kebijaksanaan pemerintah harus sejalan dengan kepentingan umum, bukan untuk kepentingan golongan atau diri sendiri. Di sini pemerintah harus mempertimbangkan prinsip profesionalisme dengan menempatkan se-seorang sesuai dengan keahliannya.

Sejalan dengan prinsip ini, dalam konteks Indonesia, pemerintah juga harus mempertimbangkan keberatan sebagian besar rakyat (umat Islam) yang tidak setuju kalau Indonesia membuka hubungan dengan Israel. Pemaksaan kehendak untuk merealisasikan hubungan dengan Israel berarti tidak sesuai dengan kemaslahatan rakyat.

العادة المحكمة

"Adat kebiasaan (dalam suatu masyarakat) dapat dijadikan sebagai hukum".¹⁷

Kaidah ini menunjukkan bahwa hukum yang akan diberlakukan oleh pemerintah harus sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat. ini dimaksudkan agar masyarakat yang akan menjalankan hukum atau ketentuan pemerintah tidak merasa keberatan karena bertentangan dengan kebiasaan mereka. Namun demikian, adat di sini yang dapat dijadikan dasar hukum tidak boleh pula bertentangan dengan semangat ruh syari'at Islam. Oleh sebab itu, adat atau kebiasaan memberi hadiah kepada pejabat negara harus dihilangkan.

¹⁷ H. Muchlis Usman, *Kaidah Kaidah Ushuliyah Dan Fiqhiyah*, hal.140

درالمفاسد أولى من جلب المصالح

"Menghindari bahaya harus lebih diutamakan dari meraih manfaat".¹⁸

Dalam kaidah ini, pemerintah harus membuat kebijaksanaan politik dan perundang-undangan sesuai dengan skala prioritas. Kalau dalam suatu masalah terdapat dua hal yang bertentangan, di satu sisi menguntungkan tapi di sisi lain menimbulkan bahaya, maka yang harus didahulukan adalah prinsip menghindari bahaya.

Hampir sejalan dengan prinsip atau kaidah ini adalah kaidah yang berbunyi:

المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة

"Kemaslahatan umum yang lebih luas harus diutamakan atas maslahatan yang khusus (golongan atau kelompok tertentu)"¹⁹

Berdasarkan kaidah ini, untuk melindungi kemaslahatan masyarakat yang lebih luas, pemerintah harus bersikap tegas menghukum berat, seperti hukuman mati, terhadap pengedar dan pemakai narkotik dan obat-obat terlarang lainnya (narkoba). Karena, memperhatikan dan menyelamatkan nyawa ribuan bahkan jutaan manusia dari pengaruh narkoba, lebih maslahat dari pada nyawa hanya segelintir pengedarnya.

Karena fiqh siyasah merupakan ilmu sosial yang selalu "hidup" maka pengembangan kajiannya juga harus dibantu dengan metode lainnya, seperti metode historis, metode perbandingan, metode analisis isi, metode induktif,

¹⁸ H. Muchlis Usman, *Kaidah Kaidah Ushuliyah Dan Fiqhiyah*, hal.137.

¹⁹ Ali Ahmad al-Nadwi, *Al-Qowaid Al-Fiqhiyah*, Damasqus: Dar Al qalam, hal.53.

metode deduktif, metode observasi dan metode dialektis.

Dari metode-metode ini kita dapat menimbang, menilai dan mengapresiasi pemikiran para ulama dan praktik kenegaraan yang berkembang dalam sejarah Islam. Dari sini pula kita bisa mengambil dan menerapkan nilai-nilai positif yang relevan untuk kondisi sekarang, di samping membuang nilai-nilai negatif dan yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat dan tuntutan zaman.²⁰

Selain metode-metode tersebut di atas, fiqh siyasah juga perlu ilmu bantu yang berhubungan dengan sosial kemasyarakatan, seperti sosiologi, antropologi, sejarah, ilmu ekonomi dan, tentu saja, ilmu politik dan ilmu kenegaraan

D. Perkembangan Siyasah

Dalam sejarah Islam, siyasah (politik) telah dipraktekkan oleh Nabi Muhammad setelah beliau berada di Madinah. Di sini Nabi menjalankan dua fungsi sekaligus, sebagai Rasul utusan Allah dan sebagai kepala negara Madinah. Dalam fungsi keduanya ini, Nabi mengatur kepentingan umatnya berdasarkan wahyu yang diturunkan Allah kepadanya. Hal ini dijalankan beliau dengan sukses selama sepuluh tahun (622-632 M).

Setelah beliau wafat, fungsi kedua ini dilanjutkan oleh *al-Khulafa'*

²⁰ J Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah Dan Pemikiran*, Jakarta, rajawali Press 1997. hal.38

Rasyidun. Permasalahan siyasah (khilafah), yakni siapa yang berhak menggantikan beliau setelah wafat, inilah yang menjadi akar perbedaan pendapat di kalangan umat Islam. Perdebatan dan diskusi yang alot terjadi antara kaum muhajirin dan anshar di Saqifah Bani Sa'idah. Masing-masing mereka mengklaim sebagai pemilik sah kepemimpinan atas umat Islam. Akhirnya, disepakatilah Abu Bakar al-Shiddiq sebagai pengganti Nabi Muhammad.

Peristiwa Saqifah ini mengisyaratkan betapa permasalahan siyasah ini sangat krusial dan sensitif, sehingga membutuhkan penanganan yang bijak dan adil. Untunglah Abu Bakar dan 'Umar ibn al-Khaththab yang kemudian menggantikannya mampu menjalankan pemerintahannya dengan baik, sehingga memuaskan masing-masing kelompok di dalam tubuh umat Islam. Dua khalifah ini berhasil mengeliminir perbedaan pendapat tersebut sehingga dapat meredam gejolak dan guncangan yang mungkin terjadi.

Namun, memasuki pemerintahan 'Usman ibn' Affan, tepatnya enam tahun kedua kepemimpinannya, gejolak tersebut akhirnya muncul juga ke permukaan. 'Usman dianggap tidak pecus memimpin Negara Madinah dan terlalu mementingkan keluarga besarnya saja. Ia juga tidak mampu menahan ambisi anggota keluarganya yang memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan mereka sendiri. Akhirnya berbagai daerah melakukan pemberontakan yang mengakibatkan 'Usman tewas terbunuh di tangan umat Islam sendiri. Keadaan pun semakin kacau dan tidak terkontrol ketika 'Ali ibn Abi Thalib diangkat oleh

sebagian umat Islam untuk menggantikan posisi 'Usman. Koalisi 'Aisyah, Thalhah dan Zubeir melakukan perlawanan terhadap 'Ali. Sementara Mu'awiyah dari keluarga 'Usman menuntut 'Ali bertanggung jawab atas kematian 'Usman dan meminta agar pembunuh 'Usman diadili. Mu'awiyah yang dipecat dari gubernur Syam oleh 'Ali, bahkan menyusun kekuatan untuk melawan 'Ali. Akhirnya terjadilah peperangan antara 'Ali dengan dua kelompok oposisi ini. Perlawanan trio 'Aisyah, Thalhah dan Zubeir dapat dipadamkan oleh 'Ali. Tapi, Mu'awiyah cukup kuat juga, sehingga 'Ali terpaksa menguras tenaga untuk memadamkannya. Banyak pasukannya yang gugur di perang Siffin melawan Mu'awiyah ini. Ketika kemenangan hampir berada di tangan 'Ali, tiba-tiba 'Amr ibn al-'Ash dari kelompok Mu'awiyah mengacungkan mushaf Al-Qur'an mengajak 'Ali mengadakan gencatan senjata dan bertahkim untuk menyelesaikan perselisihan di antara dua kelompok ini.

Akan tetapi tahkim pun tidak menyelesaikan masalah. 'Amr yang mewakili Mu'awiyah ternyata sangat lihai dan licik mengelabui utusan Ali, Abu Musa al-'Asyari. Hasil tahkim hanya menguntungkan Mu'awiyah dan tidak memuaskan 'Ali. Namun 'Ali mau tidak mau harus tunduk pada keputusan tersebut. Melihat keadaan ini, sebagian pasukan 'Ali keluar dan membentuk kelompok sendiri yang dikenal dengan Khawarij.

Dari pertentangan di atas, akhirnya umat Islam terpecah menjadi tiga kekuatan politik, yaitu kelompok Mu'awiyah yang akhirnya menguasai pentas

politik Islam dan menjadi mayoritas, kelompok pendukung 'Ali (Syi'ah) dan kelompok Khawarij. Sebenarnya masih ada satu kelompok lagi yang tidak mau melibatkan diri dalam kegiatan politik, yaitu Mu'tazilah. Mereka bersikap netral dan tidak mendukung pihak mana pun. Masing-masing kelompok ini mempunyai pandangan dan pemikiran politik sendiri yang berbeda satu sama lainnya.

Pada awalnya, pemikiran politik mereka hanya merupakan respons spontan dari perkembangan yang terjadi. Namun, dalam perkembangan selanjutnya, pemikiran mereka disusun secara sistematis, sehingga menjadi satu gagasan utuh. Kelompok-kelompok tersebut, melalui para pemikir dan praktisi politiknya, menuliskan gagasan mereka untuk membuang paradigma kelompok mereka dan menolak serangan kelompok-kelompok lainnya. Dalam sejarah Islam, perkembangan kajian fiqh siyasah secara sederhana dapat dibagi ke dalam periode klasik yang berlangsung hingga 1258 M, periode pertengahan yang berakhir pada abad ke-19 dan periode modern hingga sekarang.

1. Periode Klasik.

Ciri yang menandai perkembangan kajian fiqh siyasah pada periode klasik adalah kemapanan yang terjadi di dunia Islam. Secara politik, Islam memegang kekuasaan dan pengaruhnya di pentas internasional. Pada periode ini terdapat dua dinasti, yaitu Bani Umayyah (661-750 M) dan Bani

Abbas (750-1258 M). Pada masa kekuasaan Bani Umayyah, kajian fiqh siyasah masih belum muncul. Bani Umayyah lebih mengarahkan kebijaksanaan politiknya pada pengembangan wilayah kekuasaan. Memang ada kelompok oposisi, seperti Khawarij dan Syi'ah pada masa ini, tetapi tidak mempunyai pengaruh yang kuat. Pemikiran-pemikiran dan gerakan mereka pun cenderung radikal dan ekstrim dalam menentang kekuasaan Bani Umayyah.

Pada masa daulat Bani Abbas barulah kajian fiqh siyasah ini mulai dikembangkan. Namun demikian, kuatnya pengaruh negara membuat kajian yang dikembangkan oleh para ulama ketika itu cenderung mendukung kekuasaan. Inilah yang terjadi di kalangan ulama Sunni pada umumnya.

Meski demikian, Ibn Abi Rabi' mengembangkan pemikirannya dengan mengadopsi beberapa pemikiran filosof Yunani. Ketika berbicara tentang asal mula timbulnya negara, misalnya, Ibn Abi Rabi' mendukung pendapat Plato yang menyatakan bahwa manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri tanpa bantuan orang lain. Ini merupakan awal timbulnya kerja sama antara sesama manusia yang pada gilirannya akan membentuk negara.²¹

Pandangan Ibn Abi Rabi', dalam beberapa hal, juga mendapat dukungan dari al-Ghazali (1058-1111 M). Al-Ghazali, dalam kitabnya *AL-*

²¹ Munawir Sjadzali, *Islam Dan Tat Negara Dan Pemikiran*, Jakarta UI Press, 1991 hal 43

Iqtishad fi al-I'tiqad, menyebutkan bahwa kekuasaan kepala negara adalah kudus (suci). Karenanya, umat tidak boleh memberontak terhadap kekuasaan. Berbeda dengan mereka, al-Mawardi (975-1059) masih memungkinkan pemecatan kepala negara dari jabatannya. Al-Mawardi juga mengemukakan teori "kontrak sosial" antara kepala negara dan rakyatnya. Karena kepala negara diangkat melalui kontrak sosial, maka al-Mawardi meniscayakan adanya pemberhentian kepala negara dari jabatannya.

Berdasarkan kenyataan ini, Harun Nasution menyimpulkan bahwa teori politik Sunni abad klasik ini cenderung memberi legitimasi terhadap kekuasaan. Ini wajar, karena pada umumnya tokoh fiqh siyasah pada masa ini berada di lingkaran kekuasaan. Sebagai contoh, al-Mawardi sendiri adalah salah seorang pejabat penting dalam pemerintahan Bani 'Abbas.

Pengaruh Plato jelas sekali dalam pandangan al-Farabi ketika ia membagi warga negara ke dalam tiga kelas sosial, yaitu kelas pemimpin, kelas tentara (militer) dan kelas rakyat jelata. Menurutnya, kepala negara haruslah seorang filosof, karena filosoflah yang dapat membawa manusia ke dalam kebaikan dan hikmah.

Di sisi lain, Syi'ah, Khawarij dan Mu'tazilah juga mengembangkan gagasan politik masing-masing. Syi'ah selalu mempropagandakan pandangan tentang keutamaan Ali dan keluarganya sebagai khalifah serta doktrin kema'suman imam.

Sedangkan Khawarij, karena sikap ekstrem dan radikal mereka, tidak begitu berpengaruh dalam pentas politik. Pemikiran politik mereka tidak tersusun secara sistematis dalam sebuah karya. Namun pemikiran mereka sedikit banyak diadopsi dan dikembangkan secara sistematis oleh Mu'tazilah. Salah seorang tokoh penting di kalangan Mu'tazilah ini adalah Qadhi 'Abd al-Jabbar. Ia menulis kitab *Syarh al-Ushul al-Khamsah* dan *al-Mughni*, yang dalam beberapa bagian membahas tentang pemikiran politik Mu'tazilah. Berbeda dengan kalangan Sunni yang menganggap *imamah* (kepemimpinan) sebagai kewajiban syar'i, Mu'tazilah, begitu juga Khawarij, memandang bahwa pengangkatan institusi *imamah* hanyalah berdasarkan akal. Kerjanya, kepala negara bukanlah orang yang sempurna tidak punya salah seperti pandangan Syi'ah, juga tidak harus dari Quraisy, seperti klaim kelompok Sunni. Siapa saja, menurut 'Abd al-Jabbar, asalkan memiliki kemampuan dan syarat yang cukup, dapat menjadi kepala Negara.²²

2. Periode Pertengahan.

Periode pertengahan ditandai dengan hancurnya kerajaan Abbasiyah pada 1258 M di tangan tentara Mongol. Pada masa ini, kekuatan politik Islam mengalami kemunduran. Karena itu, kecenderungan pemikiran politik Islam juga mengalami perubahan. Tokoh yang mengalami langsung tragedi penyerangan tentara Mongol ke Baghdad adalah Ibn Taimiyah (1263-1328 M). Ia lahir di Harran, dekat Damaskus, hanya lima tahun setelah peristiwa

²² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, Radar Jaya Pratama, Jakarta, 2001 hal.21-23

tersebut. Bahkan ketika berumur enam tahun Ibn Taimiyah juga harus dilarikan ayahnya untuk mengungsi menghindari kekejaman tentara Mongol yang mulai bergerak menyerbu kota Harran. Pengalaman pahit ini ternyata sangat membekas dalam kepribadian Ibn Taimiyah dan mempengaruhi pemikiran politiknya.

Akhirnya, seperti halnya pemikir Sunni abad klasik, Ibn Taimiyah juga menganggap kepala negara sebagai bayang-bayang Allah di bumi-Nya. Sebagai konsekuensi pendapatnya ini, Ibn Taimiyah juga mewajibkan rakyat taat kepada kepala negara meskipun dzalim. Ia bahkan menegaskan bahwa orang yang melakukan pemberontakan kepada kepala negara yang dzalim dan mati, maka ia mati dalam keadaan jahiliyah. Pandangan Ibn Taimiyah tentu tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial politik umat Islam saat itu. Pada masanya, dunia Islam benar-benar hancur. Trauma penyerangan tentara Mongol begitu membekas dalam hati Ibn Taimiyah. Dunia Islam pasca-Mongol membutuhkan persatuan dan kesatuan. Untuk itu, dunia Islam harus mempunyai kepala negara yang kuat dan berwibawa serta mampu mengembalikan kekuatan umat Islam. Ibn Taimiyah melihat ancaman disintegrasi Islam yang lebih luas, baik dari dalam maupun dari luar Islam.

Dari dalam, Islam mengalami perpecahan dan pengelompokan kekuatan politik yang mengental. Pada masa Ibn Taimiyah, kelompok Syi'ah menjadi oposisi yang selalu merongrong dan berusaha menjatuhkan

kekuasaan kepala negara. Mereka merupakan duri dalam daging di tubuh umat Islam.²³

Pemikir Sunni lainnya yang juga membahas siyasah adalah Ibn Khaldun (1332-1406 M). Pandangan politiknya antara lain tertuang dalam karyanya *Muqaddimah*. Di antara tesisnya yang berbeda dengan pemikir Sunni lainnya adalah interpretasinya yang kontekstual terhadap hadits Nabi yang mensyaratkan suku Quraisy sebagai kepala negara. Ia menganggap hadits ini bersifat kondisional. Karenanya, suku mana saja bisa memegang posisi puncak pemerintahan Islam, selama ia mempunyai kemampuan dan kecakapan. Jadi syarat suku Quraisy bagi Ibn Khaldun bukanlah "harga mati".

Seperti halnya Ibn Taimiyah, pandangan Ibn Khaldun ini juga dimaksudkan sebagai antisipasi terhadap kondisi politik dunia Islam yang terpecah. Pada masa Ibn Khaldun, perpecahan dunia Islam semakin parah. Kekuasaan Islam di Spanyol sudah semakin lemah dan umat Islam di sana dipaksa masuk Kristen atau diusir dari Spanyol. Periode ini dapat dikatakan sebagai fase k. munduran dunia Islam, Ibn Khaldun menyaksikan langsung keadaan ini, bahkan menjadi pelaku dalam dunia politik Islam ketika itu.

²³ Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Masalah Kenegaraan*, Jakarta, LP3ES, hal.38

3. Periode Modern

Periode modern ditandai oleh semakin lemahnya dunia Islam di bawah penjajahan bangsa-bangsa Barat. Hampir seluruh negeri muslim berada di bawah imperialisme dan kolonialisme Barat. Di samping menjajah dunia Islam, Barat ternyata mencoba mengembangkan gagasan-gagasan politik dan kebudayaan mereka yang, tentu saja, tidak terlepas dari pengaruh sekularisme, ke tengah-tengah umat Islam. Di sisi lain, dunia Islam sendiri tidak mampu menyaingi keunggulan Barat dalam bidang teknologi, ilmu pengetahuan, ekonomi dan organisasi. Menghadapi penetrasi Barat ini, sebagian pemikir muslim ada yang bersikap apriori dan anti Barat, ada yang mencoba belajar dari Barat dan secara selektif mengadopsi nilai-nilai Barat yang positif yang tidak bertentangan dengan Islam. Namun tidak jarang pula ada tokoh yang bersikap pro dan meniru Barat secara mentah-mentah serta menjadikannya sebagai pro bagi kehidupan muslim.

Dalam lapangan politik, sikap pertama melahirkan aliran yang menyatakan bahwa Islam adalah agama yang serba lengkap mengatur segala aspek kehidupan manusia, termasuk politik dan kenegaraan. Mereka merujuk kepada teladan Nabi Muhammad mendirikan negara dan *al-Khulafa' al-Rasyidun*. Sikap kedua melahirkan aliran yang berpandangan bahwa Islam hanya memberikan seperangkat tata nilai dalam kehidupan

politik kenegaraan umat Islam. Sedangkan sikap ketiga melahirkan aliran sekularisme yang memisahkan kehidupan politik dari agama. Pemikiran inilah yang selanjutnya berkembang hingga masa kontemporer.²⁴

²⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, Radar Jaya Pratama, Jakarta, 2001 hal.26

BAB III

IDEOLOGI DAN PERGERAKAN POLITIK KAMMI

A. Sejarah KAMMI

Di Indonesia fenomena gerakan kelompok keagamaan radikal memang mengalami perubahan yang cukup besar dalam satu dasawarsa terakhir. Munculnya berbagai kelompok semacam Front Pembela Islam (FPI), Brigade Hizbullah, Barisan Bismillah, Jundullah, Laskar Jihad dan KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia) telah mampu memahami pergolakan politik Islam di tanah air.

Dalam sebuah penelitian yang dilakukan lembaga peneliti Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), KAMMI dan beberapa organisasi tersebut diatas dikategorikan sebagai Kelompok Radikal Keagamaan (KRK).¹ Ada 9 KRK yang menjadi obyek penelitian UMS itu, yakni: Majelis Ta'lim Al-Ishlah (MTI), Front Pembela Islam Surakarta (FPIS), Brigade Hizbullah, Barisan Bismillah, Jundullah, Laskar Hizbullah Sunan Bonang, GPK (gerakan Pemuda Ka'bah), Laskar Jihad dan KAMMI.

KAMMI adalah organisasi yang kelahirannya dibidani oleh Forum Silaturrahi Lembaga Dakwah Kampus (RS-LDK). Kelahiran KAMMI berawal dari acara silaturrahi FS-LDK se-Indonesia ke 10 di Universitas

¹ Pada Bulan Mei 2002, Hasil Penelitian Itu Telah Diterbitkan Menjadi Sebuah Buku Yang Radikalisme Keagamaan Dan Perubahan Sosial. Lihat Jurnal Taswir Al Afkar, h. 93

Muhammadiyah Malang (UMM) pada tanggal 25-29 Maret 1998.² Diakhir acara silaturahmi³ tahun itu, tepatnya pada hari Ahad tanggal 29 Maret 1998 akhirnya muncul kesepakatan untuk mendeklarasikan⁴ piagam pembentukan KAMMI dengan menetapkan Fahri Hamzah (Mahasiswa Pasca Sarjana UI) sebagai Ketua Umumnya dan Haryo Setyoko (Mantan Ketua Senat Mahasiswa UGM) sebagai Sekretaris Umum.⁵

Perdebatan seru muncul pada tataran operasionalisasi, yaitu bagaimana LDK mewujudkan sikap pandangannya terhadap permasalahan bangsa yang terjadi, tanpa menyeret lembaga ini ke dalam pusaran politik praktis. Beragama pendapat yang muncul, berbuah tidak adanya kesepakatan dari sidang komisi untuk melahirkan rumusan bersama. Akhirnya, diambil inisiatif jalan tengah, yaitu melanjutkan pembahasan mengenai hal ini di luar FS-LDK yang sudah terjadwalkan sejak semula. Jalan ini diambil, karena memang sejak awal, panitia tidak secara khusus mengagendakan tema ini. Namun kuatnya respon para peserta agar LDK menyikapi perkembangan krisis nasional yang sedang terjadi, membuat para pemimpin sidang memutuskan jalan tengah.

² Damanik, Ali Said, *Fenomena Partai Keadilan, Transformasi 20 Tahun Gerakan Tarbiyah Di Indonesia*, h. 182

³ FS-LDK X dihadiri oleh sekitar 64 kampus, 69 LDK dengan peserta 200 orang yang berasal dari berbagai kampus di Jawa, Sumatera, dan Kalimantan.

⁴ Piagam Deklarasi itu berbunyi: Deklarasi Malang, Bismillahirrahmanirrahim. Didasari keprihatinan yang mendalam terhadap krisis nasional yang melanda negeri ini dan didorong tanggungjawab moral terhadap penderitaan rakyat yang masih terus berlangsung, serta itikad baik untuk berperan aktif dalam proses perubahan dan perbaikan, maka kami segenap mahasiswa muslim Indonesia mendeklarasikan lahirnya Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI). Selanjutnya KAMMI menempatkan diri sebagai bagian tak terpisahkan dari rakyat dan senantiasa berbuat untuk kebaikan bangsa dan rakyat Indonesia, Malang 29 Maret 1998. lihat Andi Rahmat, *Gerakan Perlawanan dari Masjid Kampus*, h. 72

⁵ Damanik, *Fenomena Partai Keadilan*, h. 185

Menindaklanjuti jalan tengah ini, dibentuklah Tim Formatur yang beranggotakan 8 (delapan) orang dari peserta, mereka adalah:

1. Ananto Pratikno (Ketua Jamah AR Fachruddin UMM 1997/1998), sebagai Ketua Tim
2. Badaruddin (Ketua forkom LDK Unair 1998/1999)

Tugas utama Tim Formatur ini adalah membahas dan menformulasikan bentuk respon LDK terhadap krisis nasional yang terjadi. Sementara tim ini bekerja, agenda-agenda FS-LDK juga terus berjalan sesuai agenda yang telah direncanakan sebelumnya. Dalam hasil kerjanya, Tim Formatur ini menyepakati dua hal, yaitu:

1. Sepakat untuk membentuk sebuah wadah khusus bagi para aktivis LDK di luar FS-LDK dan LDK itu sendiri untuk merespon permasalahan krisis nasional yang semakin parah, termasuk pada tataran aksi.
2. Sepakat untuk mendeklarasikan wadah baru ini setelah selesainya acara FS-LDK X, sehingga wadah ini bukan sebagai salah satu keputusan FS-LDK X, tetapi kesepakatan para peserta yang terjadi bersamaan dengan berakhirnya penyelenggaraan FS-LDK.

Tim Formatur ini juga sampai pada kesepakatan bahwa wadah itu bernama Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI).⁶ Ada pertimbangan yang diberikan Tim Formatur atas penggunaan kata "Muslim

⁶ Mahfud Sidiq, *KAMMI dan Pergulatan Reformasi*, Era Intermedia, Solo, 2003, h. 96-97

Indonesia” dalam KAMMI.⁷ Pertama, sejarah telah membuktikan bahwa gerakan massa yang berhasil di Indonesia adalah gerakan yang memperhatikan atau memiliki basis kultural. Kultural Indonesia adalah Islam, karena mayoritas rakyat Indonesia adalah muslim. Kedua, forum silaturahmi LDK Nasional X adalah acara yang menghadirkan mahasiswa-mahasiswa yang aktif di masjid atau dalam kegiatan-kegiatan keislaman. Karena itu sangat wajar kemudian merumuskan wadah perjuangan menggunakan label “Muslim Indonesia”, bukan Indonesia.

Penggunaan nama KAMMI juga memiliki lima konsekwensi, yaitu sebagai berikut:

Pertama, KAMMI harus menjadi kekuatan yang terorganisir yang menghimpun berbagai elemen mahasiswa muslim, baik perhimpunan maupun lembaga yang sepakat bekerja dalam format bersama KAMMI.

Kedua, KAMMI harus membangun gerakan yang berorientasi kepada aksi riil dan sistematis dan dilandasi gagasan konseptual yang matang tentang reformasi dan pembentukan masyarakat madani.

Ketiga, aktivis KAMMI adalah kalangan mahasiswa dari berbagai strata dan seluruh daerah di Indonesia.

Keempat, aktivis inti KAMMI adalah kalangan mahasiswa yang memiliki komitmen perjuangan keislaman dan kebangsaan yang jelas dan benar serta senantiasa menunjukkan akhlaqul karimah dalam berbagai aktifitasnya.

⁷ Andi Rahmat, Muhammad Najib, *Gerakan Perlawanan Dari Masjid Kampus*, h. 75-76

Kelima, gerakan KAMMI dilandasi pemahaman atas realitas bangsa Indonesia dengan berbagai kemajemukannya, sehingga KAMMI akan bekerja untuk kebaikan dan kemajuan bersama rakyat, bangsa dan tanah air Indonesia.

KAMMI juga menolak sinyalemen yang mengatakan bahwa KAMMI merupakan reinkarnasi dari KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia) tahun 66. Ketua umum Fahri Hamzah menegaskan:

“KAMMI bukanlah reinkarnasi KAMI tahun '66 dulu, karena akan sejarah dan setting politiknya berbeda. Kalaupun ada kesamaan. Itu lebih pada misinya untuk mengedepankan aspirasi rakyat dan mengantarkan bangsa ini kepada perubahan dan perbaikan”.⁸

Sebetulnya FS-LDK di Malang awalnya hanya merupakan kegiatan tahunan yang biasa digunakan ajang silaturahmi, namun kondisi kali itu menjadi lain sehingga memunculkan deklarasi Malang yang melahirkan KAMMI.

Dua alasan yang mendasari kondisi berbeda tersebut adalah:

Pertama, terjadinya keprihatinan yang mendalam terhadap krisis nasional yang melanda Indonesia dan didorong oleh tanggungjawab moral terhadap penderitaan rakyat, berita itikad baik untuk berperan aktif dalam proses perubahan ke arah yang lebih baik.

Kedua, lahirnya kesepakatan dalam sidang-sidang FS-LDK untuk melakukan konsolidasi dan koordinasi antar kampus, guna membangun kekuatan yang dapat berfungsi sebagai Peace Power untuk melakukan tekanan moral terhadap

⁸ Andi Rahmat, Muhammad Najib, *Gerakan Perlawanan Dari Masjid Kampus*, h. 77

pemerintah. Pada rapat Pleno pada saat itulah, akhirnya disepakati membentuk wadah yang dapat mengkoordinasikan dan menyatukan berbagai LDK.

Mempertimbangkan waktu dan kondisi dilahirkannya KAMMI di puncak esklarasi krisis Indonesia, tidak heran jika KAMMI kemudian menjadi sebuah “forum” kesadaran terhadap krisis yang menerpa bangsa ini. Karena itu, sangat wajar jika dalam pandangan umumnya, KAMMI juga memberikan sebuah sikap terhadap berbagai krisis, khususnya krisis ekonomi yang menimpa rakyat Indonesia saat itu. Menurut KAMMI, berbagai krisis tersebut tidak lepas dari sistem politik yang distorsi. Format politik yang dikembangkan Orde baru telah menumbuhkan suburkan korupsi, kolusi dan nepotisme. Karena itu, bentuk penyelesaian terhadap krisis tersebut harus menjangkau ke seluruh segi kehidupan berbangsa dan bernegara, tidak semata-mata reformasi ekonomi dan politik, tetapi juga reformasi hukum dan perundang-undangan, serta reformasi sosial dan kebudayaan.

Bagi KAMMI, semua krisis yang menimpa negeri ini kala itu dianggap sebagai “krisis moralitas”. Karena itu, KAMMI memandang perlunya meneguhkan nilai dan norma keagamaan yang dianut berbagai pemeluk agama di Indonesia dan mengarahkan setiap upaya perubahan dan perbaikan. Dalam pandangan KAMMI, ketika moralitas dipinggirkan, maka yang terjadi adalah peringatan Tuhan yang kala itu berupa krisis multidimensional. KAMMI merujuk gambaran itu dalam Al-Qur’an surat Al-An’am ayat 44:

فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، فَتَخَنَّا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا
 أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ

"Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang Telah diberikan kepada mereka, kamipun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka; sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang Telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong, Maka ketika itu mereka terdiam berputus asa".⁹

Kelahiran KAMMI memang sangat terkait dengan situasi dan kondisi eksternal yang terjadi karena tidak berlebihan bila dikatakan bahwa kelahiran KAMMI salah satunya juga dalam rangka merespon kondisi kehidupan sosial politik yang sedang bergejolak saat itu. Berbagai krisis yang terjadi sejak tahun 1997 telah memicu gelombang protes massa dari berbagai kalangan. Lantaran itu pula, maka muncul tudingan bahwa kelahiran KAMMI hanyalah mengikuti arus besar gelombang protes tersebut.

Sekjen KAMMI Haryo Setyoko membantah tudingan itu dengan mengatakan bahwa KAMMI merupakan organisasi yang beranggotakan individu-individu yang punya basis kultur religius, yang selama 20 tahun aktifitasnya terpusat di lembaga-lembaga dakwah kampus (LDK) dan hingga kini terus mengalami penguatan-penguatan visi keagamaan, intelektual dan politik.¹⁰ Proses intelektualisasi dan penguatan visi keagamaan serta politik itu kemudian dibangun dalam sebuah bingkai kesadaran spiritual religiusitas yang mempunyai

⁹ Al-Qur'an dan Terjemahnya, Komplek Percetakan Al-Qur'anul Karim Kepunyaan Raja Fahd, Madinah, h. 193

¹⁰ Damanik, *Fenomena Partai Keadilan*, h. 189

akar panjang. Akar panjang yang dimaksud adalah kelompok-kelompok dakwah yang tumbuh subur di lingkungan kampus sejak tahun 80-an.

Dengan menundukkan Fahri Hamzah sebagai ketua umum dan Haryo Setyoko sebagai sekretaris umum, wadah ini kemudian dideklarasikan pada hari Ahad, tanggal 29 Maret 1998 atau bertepatan dengan tanggal 1 Dzulhijjah 1418 H, jam 13.30 di aula UMM (Universitas Muhammadiyah Malang), beberapa saat setelah FS-LDK Nasional X secara resmi ditutup oleh Pembantu Rektor II UMM. Hasil-hasil keputusan Tim Formatur dibacakan oleh Ananto Pratikno. Ketua JMAF UMM, dihadapan peserta FS-LDK Nasional X yang saat itu masih tetap berkumpul di ruangan. Setelah itu, deklarasi pendirian KAMMI yang tertuang dalam “Deklarasi Malang” dibacakan oleh Fahri Hamzah yang mendapat amanah sebagai Ketua Umum, dan setelah itu dilakukan penandatanganan Piagam Deklarasi Malang oleh sebagian besar peserta yang hadir.

Pada saat yang sama, KAMMI menyatakan sikap politik pertamanya yang diberi nama “Pandangan Umum KAMMI atas Berbagai Persoalan Bangsa Indonesia” setebal 5 (lima) halaman. Pandangan ini dibacakan di hadapan peserta FS-LDK X oleh Haryo Setyoko, Sekretaris Umum yang diangkat. Secara umum pandangan itu berisi hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa krisis nasional yang sedang terjadi adalah tanggungjawab utama pemimpin dan pemerintahannya yang mengemban amanat rakyat untuk menjalankan pembangunan nasional

2. KAMMI mengkritisi bahwa para pemimpin dan pemerintahannya justru selama ini mempertunjukkan sikap dan perilaku kontradiktif yang telah meruntuhkan kepercayaan dan harapan rakyat terhadap mereka
3. Menegaskan bahwa rakyat dengan berbagai komponennya yang memiliki dan cinta negeri ini, harus berbuat secara sadar dan yakin untuk menyelamatkan negeri
4. KAMMI menuntut dilaksanakannya reformasi dalam berbagai bidang, bukan saja reformasi bidang ekonomi, tetapi juga politik, hukum, budaya, dan moral. KAMMI melihat bahwa kesemuanya ini saling terkait dan saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Ini menjadi seruan pertama KAMMI untuk menuntut reformasi total
5. Dalam pemahamannya, KAMMI menegaskan bahwa persoalan paling mendasar bangsa Indonesia adalah rusaknya nilai dan moralitas yang berbasis agama. Bangsa Indonesia dan para pemimpinnya, mayoritas adalah muslim. Kehancuran negeri dan pemerintahannya adalah akibat langsung dari rusaknya nilai moralitas agama (Islam) para pemimpin negeri ini.¹¹

Adapun bentuk struktur organisasi yang ditetapkan meliputi: Ketua Umum, Sekretaris Jendral (Yang Membawahi Biro Kesekretariatan, Biro Pengembangan Organisasi dan Biro Humas) Bendahara, dan Lima Departemen yang meliputi Departemen Kajian Strategis, Departemen Pembinaan Wilayah,

¹¹ Hasil Wawancara Dengan Herman Susilo, Mantan Konwil VI KAMMI

Departemen Kaderisasi, Departemen Pengabdian Pada Masyarakat, dan Departemen Dana Usaha.¹²

B. Ideologi

Sejak awal lahirnya gerakan ini, KAMMI telah menetapkan Islam sebagai ideologinya. Dalam rumusan anggota dasar KAMMI ideologi diletakkan sebagai asas. Ideologi itu kemudian diperinci untuk dijadikan landasan gerak operasional KAMMI. Perumusan perincian ini dibulatkan pada acara Rapat Kerja Nasional Departemen Kaderisasi pada tanggal 9-15 Agustus 1999 di Parung Bogor.

Adapun rumusan ideologi itu adalah:

1. Kemenangan Islam adalah jiwa perjuangan KAMMI
2. Kebathilan adalah musuh abadi KAMMI
3. Solusi Islam adalah tawaran perjuangan KAMMI
4. Perbaikan adalah tradisi perjuangan KAMMI
5. Kepemimpinan umat adalah strategi perjuangan KAMMI
6. Persaudaraan adalah watak muamalah KAMMI

1. Kemenangan islam adalah jiwa perjuangan KAMMI

KAMMI meyakini sepenuhnya sunnah yang telah ditetapkan Allah SWT, bahkan kemenangan Islam adalah suatu kepastian dan sebuah aksioma dalam kamus perjuangan umat. Landasan (dalil) agamanya adalah Al-Qur'an surat Al-Anbiya' ayat 105 yang berbunyi:

¹² Rahmat, *Gerakan Perlawanan*, h. 183

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ
الصَّالِحُونَ

"Dan sungguh Telah kami tulis didalam Zabur sesudah (Kami tulis dalam) Lauh Mahfuzh, bahwasanya bumi Ini dipusakai hamba-hambaKu yang saleh".

Selain dalil itu, landasan ideologi pertama yang dijadikan patokan adalah Al-Qur'an surat Al-Mujadilah ayat 21:

كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

"Allah Telah menetapkan: "Aku dan rasul-rasul-Ku pasti menang". Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa".

Dua landasan itu yang menjadi bahan baku perjuangan KAMMI yang menyatakan di setiap dada ini. Cahayanya tak akan pernah redup, pancarannya menghangatkan jiwa dan benderangnya memerangi langkah demi langkah menuju ridho-Nya, KAMMI yakin bahwa sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Dekat bagi mereka yang mengharap pertolongan dengan Allah SWT, dan dekat dengan mereka yang ikhlas.

2. Kebathilan adalah musuh abadi KAMMI

KAMMI meyakini sepenuhnya bahwa kebathilan dengan segala bentuk adalah penyakit yang menyengsarakan umat manusia, oleh karenanya, ia harus diperangi dan dimusuhi. Fitrah manusia sepanjang masa selalu menolak penyakit yang menyengsarakan mereka, namun banyak manusia

yang tidak sadar bahkan tidak mengenal penyakit yang diderita atau yang mengancam dirinya, sehingga mereka tidak melakukan pencegahan atau upaya pengobatan. Menjadi masalah KAMMI untuk menyadarkan umat akan hakekat kebathilan karena KAMMI meyakini bahwa mengenal kebathilan adalah bagian dari integritas Islam. KAMMI yakin bahwa Al-Qur'an dan As-Sunnah adalah satu-satunya standon penentu kebenaran dan kebathilan, KAMMI menyatakan perang terhadap segala bentuk kebathilan yang ditegaskan kitab Allah dan Sunah Rasul. Selama ia menjadi musuh abadi KAMMI sampai tiba saatnya Allah menghancurkan kebathilan itu melalui tangan-tangan para prajurit kebenaran.

3. Solusi Islam adalah tawaran perjuangan KAMMI

KAMMI meyakini bahwa Islam adalah satu-satunya jalan yang mengantarkan perjuangan umat ini kepada kebahagiaan. Islam adalah titik tolak perjuangan, metode dan jalan, sebagaimana ia adalah tujuan. KAMMI meyakini sepenuhnya bahwa hanya Islam yang mampu mengembalikan kemanusiaan manusia, menyeimbangkan antara ruh dan jasad, memadukan antar jasmani, akal dan rohani, dan membawa manusia menuju keutuhan peradaban.

Landasan dari rumusan ideologi ini adalah Al-Qur'an surat Al-Anbiya' ayat 10 yang berbunyi:

لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

“Sesungguhnya Telah kami turunkan kepada kamu sebuah Kitab yang di dalamnya terdapat sebab-sebab kemuliaan bagimu. Maka apakah kamu tiada memahaminya?”

4. Perbaikan adalah tradisi perjuangan KAMMI

KAMMI selalu melandasi gerakannya pada prinsip istilah (perbaikan) mulai dari perbaikan individu, keluarga, masyarakat, sampai perbaikan bangsa dan negara. Sedapat mungkin KAMMI menghindari gerakan atau aktifitas yang membawa kerusakan meskipun ada manfaat yang diperoleh darinya. KAMMI berprinsip menghindari kerusakan lebih diutamakan dari pada mengambil manfaat.

Islam sebagai azas KAMMI mewajibkan umat untuk menjaga lima penopang hidup manusia, yaitu agama, akal, jiwa, kehormatan, dan benda. Oleh karena itu, seluruh gerak dan aktivitas KAMMI senantiasa berorientasi pada perbaikan dan pemeliharaan lima hal tersebut sebagaimana KAMMI akan memerangi setiap upaya untuk merusaknya. Untuk merealisasikan semua itu, KAMMI berpegang teguh pada syri'at Islam, sebab disanalah sumber kebaikan, sebagaimana KAMMI berpegang teguh pada prinsip dakwah islamiyah sebagai metode perbaikan. KAMMI berusaha untuk memelihara dan menghidupkan tradisi perbaikan ini, karena ia adalah tradisi para Nabi dan Rasul.

5. Kepemimpinan umat adalah strategi perjuangan KAMMI

KAMMI yakin bahwa negeri ini akan bahagia ketika nilai-nilai Islam mewarnai kehidupan masyarakat di saat *amar ma'ruf nahi munkar* ditegakkan. Semua itu akan terwujud dengan baik manakala umat Islam berperan memimpin negeri ini, sebab keshalihan masyarakat lebih terjaga bila keshalihan pemimpin terwujud sebagaimana keshalihan pemimpin lebih terjamin jika terdapat kontrol dan masyarakat yang shalih. Sekali lagi KAMMI meyakini hanya Islam yang mampu melahirkan keshalihan itu.

Landasan dari rumusan ideologi ini adalah firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 143:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

"Dan demikian (pula) kami Telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu".

6. Persaudaraan adalah watak muamalah KAMMI

KAMMI senantiasa menjalin persaudaraan dengan komponen masyarakat yang, memiliki visi perbaikan untuk bangsa ini, karena KAMMI yakin bahwa upaya membangun bangsa ini tidak mungkin terwujud jika hanya dilakukan oleh sekelompok anak bangsa tanpa melibatkan yang lain. Sementara, kerjasama dalam hal ini membutuhkan jiwa persaudaraan, dengan

sesama muslim dan organisasi Islam, KAMMI berpegang teguh pada firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi:

..... إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ.....

“Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu”

Dengan rumusan ideologi tersebut, jangka panjang perjuangan KAMMI juga tidak luput dari cita-cita terwujudnya sebuah tatanan masyarakat Islami. Tatanan masyarakat itu juga bisa berupa bentuk sebuah pemerintahan (kepemimpinan) Islam atau bentuk negara Islam.¹³

Ideologi tersebut di atas dirumuskan setelah KAMMI mengubah dirinya menjadi Ormas lewat Muktamarnya yang pertama, pada tanggal 1-4 Oktober 1998 di Bekasi, Jawa Barat. Sepintas, kalau dicermati, rumusan ideologi KAMMI tersebut mempunyai kemiripan dengan ideologi perjuangan yang dimiliki Ikhwanul Muslimin.

Ideologi perjuangan Ikhwanul Muslimin, sebagaimana dirumuskan oleh pendirinya, Hasan Al-Banna, dan kerap diperdengarkan oleh tokoh-tokoh gerakan dakwah ini di Indonesia; terumuskan dalam slogan berikut: Allah Tujuan Kami (*Allah Ghoyatuna*), Rasul (*Muhammad*) Teladan Kami (*Ar-Rasul Qudwatuna*), Jihad Jalan Perjuangan Kami (*Al-Jihad Sabiluna*), Mati Syahid di Jalan Allah Cita-Cita Kami (*Asy-Syahadah Umniyatuna*).

¹³ Hasil Wawancara Dengan Fuad Hanif, Ketua KAMMI UNESA Serta Dari Buku KAMMI Dan Pergerakan Reformasi, h. 213-217

Pilihan kata dan bentuk slogan yang digunakan, meski tidak terlalu mirip, menunjukkan kesamaan ideologis itu. Platform ideologis semacam itu sebelumnya tidak pernah dimiliki oleh organisasi Islam manapun. Uraian yang lebih ideologis dapat kita temukan dalam penjelasan dari slogan-slogan ideologis KAMMI itu. Nampak jelas, bahwa KAMMI muncul sebagai sebuah representasi perjuangan yang ingin mengusung nilai-nilai ideologis yang kental sebagai karakteristik para aktivis gerakan dakwah kampus ini sejak lama, namun pada saat yang bersamaan, juga ingin tetap tampil sebagai kekuatan sosial, khususnya di tengah-tengah massa mahasiswa dengan karakteristik tersendiri.

Dalam kaitan itu, KAMMI menerjemahkan misi perjuangan secara lebih membumi, dan lebih dekat dengan lingkup aktivitas yang selama ini dikerjakannya, yang tergambarkan dalam; **pertama**, menjadi pelopor, perekat dan pemercepat proses perubahan; **kedua**, memberikan pelayanan sosial; **ketiga**, melakukan pendidikan politik bagi masyarakat.

Misi tersebut menegaskan bagaimana KAMMI, dengan spirit ideologisnya yang kental, ingin memasuki ranah yang lebih obyektif dalam kehidupan sosial politik masyarakat, khususnya dalam bingkai dinamika gerakan mahasiswa. Pilihan tersebut harus dilakukan mengingat KAMMI, meski didukung oleh seluruh komponen aktivitas gerakan dakwah (*tarbiyah*) ini, dia hanyalah sebuah gerakan mahasiswa, yang mempunyai keterbatasan-keterbatasan tertentu dalam mengemban aktivitasnya. Pada akhirnya,

sebagaimana juga berbagai lembaga, yayasan, dan industri yang diproduksi oleh jma'ah gerakan dakwah ini, KAMMI adalah salah satu diantaranya. KAMMI dapat dikatakan sebagai salah satu asosiasi dari sebuah *society* yang bernama gerakan dakwah kampus atau gerakan *tarbiyah*.

Bedanya, dalam waktu tertentu KAMMI menjadi representasi utama dari aspirasi kelompok dakwah ini, khususnya beberapa saat menjelang dan setelah Soeharto lengser, sebelum didirikan partai keadilan.¹⁴

C. Pergerakan KAMMI di UNESA

KAMMI dalam karakter gerakannya, juga menegaskan dirinya sebagai “organisasi pergerakan”, yaitu suatu kekuatan yang terorganisir yang secara terus menerus bekerja memperjuangkan cita-citanya bagi kepentingan bangsa dan negara. Berkenaan dengan karakter ini, dalam Garis-garis Besar Haluan Organisasi (GBHO), tentang paradigma gerakan, pasal 7 KAMMI menyatakan paradigmanya sebagai berikut:

1. *Gerakan Tauhid*, yaitu eksistensi KAMMI yang seluruh aktivitasnya dan kiprahnya dalam perjuangan membangun masyarakat madani, meliputi; (a) Gerakan pembebasan manusia dari segala bentuk penyembuhan selain kepada Allah SWT, (b) Pendeklarasian tata sosial masyarakat Islamiyah sebagai antitesa terhadap tata soaial jahiliyah materialisme.

¹⁴ Domanik, Ali Said, *Fenomena Partai Keadilan*, Transformasi 20 Tahun Gerakan Tarbiyah di Indonesia, H. 193-194.

2. *Gerakan Intelektual*, yaitu peran-peran yang dijalankan KAMMI berdasarkan pada kekuatan aspek keilmuan dan intelektualisme, sehingga menjadi gerakan yang rasional dan selalu moderat. Hal ini meliputi; (a) Pengembalian nilai-nilai saintifik Islam dengan melakukan interpretasi Islam secara kreatif, proporsional, dan kontekstual, (b) Melakukan pengajian Islam mulai dari berbagai sudut pandang disiplin ilmu, dan (c) Melakukan integrasi ilmu secara teoritis dalam sistem keislaman.
3. *Gerakan Sosial Mandiri*, yaitu keberadaan KAMMI harus menjadi bagian utuh dari masyarakat dan dirasakan manfaat kehadirannya secara langsung. Ini menyangkut komitmen terhadap solidaritas sosial dan pengabdian sosial yang meliputi; (a) Mendirikan bangunan jaringan dan pengelolaan potensi ekonomi umat, (b) Memberikan pendidikan masyarakat, dan (c) Melakukan pendampingan dan pemberdayaan masyarakat untuk mempresentasikan Islam sebagai *rahmatan lil 'alamin*.
4. *Gerakan Politik Ekstra Parlemen*, sebagai gerakan berbasis moral intelektual, KAMMI juga memposisikan dirinya sebagai kekuatan ekstra parlemen untuk berperan sebagai salah satu kekuatan kontrol sosial terhadap kekuasaan. Akan tetapi KAMMI juga membuka jalan untuk melakukan perubahan dari dalam sistem, dengan mentransformasikan kader-kader kepemimpinannya ke tengah-tengah masyarakat dan negara pada tahap lanjutan perjuangannya. Sebagai gerakan politik ekstra parlemen, peran KAMMI meliputi; (a) Mempengaruhi dan berupaya berpartisipasi dalam

pengambilan kebijakan publik, (b) Mengawasi dan memantau pelaksanaan kebijakan publik, (c) Memberikan penilaian dan advokasi terhadap pelaksanaan publik.

Dari paradigma gerakan yang digariskan KAMMI, terlihat potret organisasinya yang mencakup sejumlah aspek secara bersamaan. Paradigma ini menegaskan bahwa KAMMI adalah suatu organisasi gerakan moral-keagamaan, intelektual dan keilmuan, politik dan juga sosial yang bekerja untuk membangun masyarakat madani dan ikut memerankan fungsi kepemimpinan di dalamnya.

Dalam paradigma gerakan politik KAMMI di Unesa tidak jauh berbeda dengan yang ada di wilayah lain. Dan gerakan KAMMI yang pertama kali dilakukan adalah, gerakan ekstra parlementer tetapi, pada tahun 2004 gerakan ini berubah menjadi gerakan intelektual, maksudnya gerakan intelektuallah yang didominasi atau dikedepankan tetapi gerakan yang ada di atas tidak ditinggalkan karena gerakan tersebut tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya (satu kesatuan).¹⁵

D. Peran KAMMI Dalam Perpolitikan Indonesia

KAMMI lahir pada 29 Maret 1998, persis ketika krisis politik semakin akut dan krisis ekonomi telah menyebabkan korban besar pada rakyat Indonesia. Berbagai pemberitaan di media massa mengenai penderitaan rakyat akibat ekonomi telah menyentak kesadaran moral dan tanggung jawab intelektual

¹⁵ Hasil Wawancara Dengan Fuad Hanif Ketua KAMMI UNESA tanggal 24 Januari 2007

kalangan mahasiswa –dari berbagai unsur-untuk bangkit dan bergerak menuju perubahan. Apa yang dituju sebuah media pada tanggal 13 Mei 1998 secara gamblang menggambarkan situasi penderitaan rakyat Indonesia.

Hanya tiga belas hari sejak kelahirannya, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Pusat melakukan gebrakan besar dengan menggelar “Rapat Akbar Mahasiswa dan Rakyat Indonesia: di lapangan masjid Al-Azhar, Jakarta pada 10 April 1998 yang dihadiri sekitar 20 ribu massa aksi. Debut perdana ini mencengangkan publik Indonesia yang sedang meningkat tensi gelombang tuntutan reformasi. Ketua Umum KAMMI Fahri Hamzah menuntut pemerintah bertanggung jawab atas multi krisis yang terjadi dan melakukan reformasi total dengan segera. ABRI juga diseru untuk mengambil posisi yang benar, sebagai pengawal perjuangan hati nurani rakyat. Secara khas, Fahri juga mengajak seluruh rakyat Indonesia meninggalkan maksiat dan menghiasi negeri ini dengan dzikir, do’a dan silaturrahmi. Diantara kutipan isi seruan Fahri Hamzah adalah, “pemerintah haru bertanggung jawab atas segala krisis yang terjadi. Tanggung jawab yang pertama dilakukan dengan minta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia, kemudian bertobat kepada Allah SWT, dan bersedia dalam waktu sesingkat-singkatnya melakukan reformasi total...”.

Dan ada beberapa yang membuat aksi ini menjadi penting.

Pertama, jumlah massa aksi yang hadir tergolong besar, yaitu sekitar 20 ribu orang. Dari sejak pertengahan 1997 hingga akhir Maret 1998, aksi-aksi demonstrasi mahasiswa belum dilakukan secara masal, dan aksi demonstrasi

perdana yang dilakukan KAMMI Pusat dengan sekitar 20 ribu massa aksi-aksi demonstrasi menuntut reformasi.

Kedua, aksi tersebut merupakan aksi terbesar pertama mahasiswa yang dilakukan di luar kampus. Sebelumnya, berbagai aksi demonstrasi yang digelar mahasiswa masih di dalam kampus dalam bentuk panggung terbuka, orasi, pernyataan sikap dan sebagainya. Aksi demonstrasi yang masih dilakukan di dalam kampus sangat mungkin didasari dua alasan utama, yaitu aksi-aksi demonstrasi mahasiswa masih dalam tahap pematangan dan upaya menghindari sikap represif penguasa dan aparat keamanan.

Ketiga, aksi massa besar di luar kampus itu ternyata berjalan secara tertib dan aman. Tampaknya pilihan tempat lapangan masjid al-Azhar ikut membantu terselenggaranya aksi ini secara tertib dan aman. Karena aksi tersebut merupakan simbolisasi kekuatan masjid kampus yang membangun gerakannya selama hampir dua puluh tahun.

Keempat, isu utama yang diangkat adalah “reformasi total” sebagai jalan penyelesaian krisis. Ini menjadi agenda yang paling tegas dikemukakan sebagai tuntutan aksi mahasiswa.

Kelima, ini merupakan aksi pertama mahasiswa yang mampu memobilisasi dan mengkonsolidasi masa rakyat. Berbagai elemen masyarakat berdatangan fakta ini menunjukkan kemampuan KAMMI sebagai elemen gerakan mahasiswa dalam memobilisasi dukungan masa rakyat. Begitu sukses, sehingga sejak awal gerakan ini tidak menampilkan sikap dan sifat eksklusivitasnya.

Sebenarnya, sehari sebelum aksi besar yang digelar KAMMI Pusat di Jakarta pada tanggal 9 April 1998, KAMMI Yogya telah menggelar aksi demonstrasi cukup besar yang melibatkan 800 massa aksi, terdiri dari unsur mahasiswa dan masyarakat. Pada aksi itu, KAMMI menuntut reformasi total dan menolak larangan demonstrasi di kampus.

Dalam dua aksi perdana di Yogya dan Jakarta, KAMMI sebelum mengangkat agenda menuntut Soeharto mundur dari kursi kepresidenan. Isu utama yang diangkat adalah reformasi total diberbagai bidang yang harus dijalankan oleh pemerintah dan segera. Menurut pandangan mereka, belum diangkatnya isu menuntut Soeharto adalah sebagai strategi isu untuk terlibat dahulu membangun wacana reformasi total dengan segala pengertian dasarnya di publik KAMMI dan masyarakat luas, dan untuk menghindari reaksi negatif pihak keamanan atas isu sensitif ini pada awal-awal aksi gerakan mereka. Bahkan sebagai salah satu bentuk strategi isu adalah mereka mengajak kekuatan ABRI untuk berpihak kepada rakyat.¹⁶

Seperti diketahui pada awal-awal meletupnya aksi-aksi demonstrasi mahasiswa di kampus, ABRI mengambil sikap yang cenderung tidak setuju dengan aktivitas yang berbau "politik praktis". Dalam suatu kesempatan, Panglima ABRI Jenderal Wiranto menyatakan, ABRI menginginkan dialog dari pada demonstrasi. Berkenaan dengan tuntutan reformasi total yang harus

¹⁶ mahfud Sidiq, *KAMMI dalam Pergulatan Reformasi*, Era Intermedia, Solo 2003. H. 122-123.

dijalankan segera oleh pemerintah, Jenderal Wiranto berulang-ulang menegaskan, “ABRI mendukung aspirasi reformasi, namun hal itu harus dilaksanakan secara gradual, konstitusional dan tepat sasaran”. Demikian bahasa khas yang menjadi pegangan para pemimpin ABRI mengenai sikap ABRI terhadap reformasi.

Ketika tensi aksi-aksi demonstrasi mahasiswa makin meningkat dan isu-isu yang diangkat semakin keras dan tajam, reaksi keras bahkan datang dari Presiden Soeharto sendiri. Menurut presiden Soeharto, kampus dibangun dan berfungsi untuk mendidik dan menyiapkan pemimpin-pemimpin bangsa masa depan. Tentu adanya unjuk rasa di kampus akan mengganggu proses belajar mengajar. Presiden meminta jangan sampai fungsi kampus untuk mendidik para calon pemimpin bangsa ini menjadi keliru, dan kampus tidak bisa melaksanakan fungsinya dengan baik karena gangguan-gangguan itu. Hal ini diungkapkan Pangdam IV/Diponegoro, Mayjen Tyasno Sudarto kepada pers setelah ia diterima presiden di Bina Graha pada tanggal 17 April 1998.¹⁷ Senada dengan himbauan presiden, Pangdam Jaya Mayjen TNI Syafrie Syamsuddin dan Kapolda Metro Jaya Mayjen (Pol) Hamami Nata menjelaskan kepada pers bahwa aksi mahasiswa dilarang ke luar kampus dan turun ke jalan, karena dari segi keamanan tidak bisa dijamin.

Menyusul dua aksi perdananya, pada tanggal 13 April 1998, KAMMI kembali menggelar aksi besar di pelataran masjid Nuruzzaman, kampus UNAIR,

¹⁷ Andi Rahmat dan M. Hajib, *Gerakan Perlawanan Dari Masjid Kampus*, Puri Media, Solo 2001. h. 115.

Surabaya. Demonstrasi yang dihadiri sekitar 1000 massa ini mengancam akan terus menggelar aksi-aksi besar di dalam dan di luar kampus manakala pemerintah tidak segera menunjukkan keseriusannya dalam memperbaiki keadaan untuk segera melaksanakan reformasi total.

Suatu hal yang merik sejak awal, aksi-aksi demonstrasi yang digelar KAMMI baik di dalam maupun di luar kampus, selalu diikuti oleh jumlah massa yang tergolong besar. Pada sebelum Mei 1998, hampir tidak ada aksi-aksi demonstrasi mahasiswa yang diikuti oleh massa aksi dalam jumlah ribuan. Hal ini menjelaskan bahwa KAMMI sebagai organisasi gerakan mahasiswa tampaknya telah memiliki basis massa gerakan yang riil dan solid, yang berbasis LDK-LDK berbagai perguruan tinggi.

Memasuki pertengahan April 1998, situasi politik semakin memanas. Tuntutan mahasiswa dan publik pun menguat agar DPR merevisi Lima Paket Undang-undang politik. Tetapi lagi-lagi pemerintah tidak tanggap, bahkan pada tanggal 13 April 1998, presiden Soeharto mengatakan bahwa tidak mudah mengubah UU politik. Sikap pemerintah ini tak urung semakin memicu radikalisme mahasiswa dengan aparat keamanan tidak bisa dihindarkan lagi.

Merespon tensi aksi demonstrasi dan tuntutan yang semakin memanas, pihak ABRI yang ditegaskan oleh Jenderal TNI Wiranto terus berupaya mengadakan dialog dengan kalangan mahasiswa.

Kegagalan dialog yang ingin dimediasi oleh Djusril Djusjan itu disebabkan mahasiswa tidak percaya dialog dengan ABRI akan menghasilkan

keputusan produktif. Kelihatannya, krisis legitimasi itu telah mengakibatkan posisi dan citra ABRI menjadi demikian terpuruk. Mahasiswa menilai dialog dengan ABRI maupun para menteri tidak berguna, karena yang dihadapi hanyalah pembantu presiden. Ketua SM UI, Rama Pratama-kader LDK yang berhasil terpilih sebagai Ketua SM UI-melalui siaran pres yang ditandatanganinya mengemukakan bahwa dialog dengan ABRI itu adalah tawaran sepihak. Menurutnya dialog dengan Panglima ABRI hanya akan bersifat seremonial, simbolik, dan memuaskan sementara serta tidak akan menyentuh esensi permasalahan. Reaksi tidak kepercayaan serupa juga ditunjukkan oleh beberapa senat mahasiswa lain seperti UGM, Universitas Pancasila, Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (IISIP), Universitas Tujuh Belas Agustus, Universitas Jayabaya, dan Institut Sains dan Teknologi Nasional (ISTN). Dari alasan ini, lalu berkembang dialog tuntutan bahwa jika dialog ingin dilaksanakan, mahasiswa menginginkan tetapi mahasiswa tidak mau, kata Rama Pratama, namun yang diinginkan adalah dialog dengan orang yang tepat. Di Indonesia, yang paling efektif adalah dialog dengan presiden, karena yang paling berkuasa adalah presiden.

Pada saat yang sama, tuntutan kalangan mahasiswa semakin mengeras dari reformasi total hingga tuntutan turunnya Soeharto, Sidang Istimewa MPR, pencabutan Lima Paket UU Politik dan dicabutnya Dwi Fungsi ABRI. Puncak penolakan mahasiswa terhadap dialog Kemayoran adalah dengan dilakukan aksi tandingan yang digelar di sejumlah Senat Mahasiswa di Graha Widya Wisuda Kampus IPB Darmaga, Bogor persis pada tanggal 18 April 1998. aksi itu dihadiri

oleh ribuan mahasiswa dari ITS, Unair, ITB, UGM, UI, IKIP Jakarta, Unibraw, Unila, IPB, dan beberapa perguruan tinggi lainnya. Perhelatan itu dilakukan untuk menyamakan visi dan indentifikasi agenda reformasi sebagai landasan aksi terhadap kondisi bangsa.

KAMMI, sejak awal dilansirnya ide dialog dengan ABRI, telah secara tegas menyatakan penolakannya. Kita mungkin sebaiknya berbicara kepada diri sendiri dan tak perlu ada pendengar, karena kecemasan dan rasa lapar telah menutup pintu telinga, pada saat kecemasan dan rasa lapar juga telah berubah menjadi senjata.¹⁸

Dalam aksi tersebut, KAMMI mengeluarkan 12 pernyataan politiknya yaitu:¹⁹

1. Kemauan politik pemerintah untuk melakukan reformasi ekonomi, politik dan hukum harus terlihat jelas.
2. Indikasi awal adanya kemauan politik pemerintah adalah dengan menunjukkan transportasi proses pengambilan keputusan.
3. Perubahan UU sebagai konsekwensi reformasi, harus diawali oleh inisiatif pemerintah.
4. ABRI semestinya berperan sebagai katalisator reformasi.

¹⁸ Mahfud Sidiq, *KAMMI dalam Pergulatan Reformasi, Era Intermedia*, Solo 2003. H. 124-127.

¹⁹ Andi Rahmat dan M. Hajib, *Gerakan Perlawanan Dari Masjid Kampus*, Puri Media, Solo 2001. h. 112-117.

5. Mahasiswa harus dipandang sebagai elemen utuh masyarakat dan aset masa depan bangsa Indonesia dengan segala hak dan kewajibannya.
6. Aksi-aksi keprihatinan mahasiswa janganlah dipandang sebagai tindakan destruktif dan kontra-produktif terhadap proses pembangunan.
7. Sikap politik mahasiswa yang diekspresikan dalam berbagai aksi merupakan salah satu manifestasi doktrin tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pengabdian masyarakat.
8. Media massa diberikan kesempatan untuk menjalankan fungsi koreksi dan kontrol sosialnya.
9. Kerisauan pemerintah atas agenda sidang komisi HAM PBB yang akan memasukkan orang hilang, mengindikasikan suara rakyat sendiri tidak diperhatikan secara serius.
10. Mundur dari jabatan karena lemahnya kapabilitas dan kredibilitas adalah suatu kehormatan dan kejantanan.
11. Bertahannya DPR/MPR pada masa resesi menunjukkan lemahnya keterwakilan dan semangat pembelaan anggota dewan terhadap rakyat.
12. Pembersihan bangsa dari KKN harus dimulai dari lembaga-lembaga negara, baru kemudian itu akan berdampak positif bagi terbentuknya masyarakat yang bersih.

Sementara itu, pada tanggal yang sama, yaitu 24 April 1998, di UGM Yogyakarta, berlangsung Rapat Akbar KAMMI Jateng dan DIY bersama rakyat. Ada buruh, tukang becak, pedagang asongan, juga kelompok pesantren dan

remaja masjid. Dalam rapat akbar yang dihadiri tidak kurang dari 20 ribu massa, KAMMI menegaskan lagi tuntutan reformasi tolak secara damai dan mengancam penculikan aktifis. Aksi ini didukung oleh Lembaga Dakwah Kampus (LDK) baik dari dalam maupun luar Yogyakarta; seperti Jamaah Shalahuddin UGM, LDK Universitas Ahmad Dahlan, LDK UMY, Masjid Nurul Huda UNS, IKKI Undip Semarang, UKKI Unsud Purwokerto, serta didukung oleh sejumlah kelompok mahasiswa seperti liga Mahasiswa Muslim Yogyakarta (LMMY) dan Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI). Selain itu, aksi ini juga didukung oleh kelompok seniman dan cendekiawan.

Menurut Harya Setyoko, tuntutan Soeharto mundur diambil karena situasi tuntutan demonstrasi mahasiswa Yogyakarta semakin memuncak, dan hampir semua elemen gerakan yang turun, sepakat dengan agenda menuntut Soeharto mundur.²⁰

Ketika banyak elemen gerakan mahasiswa menghindari kerja sama langsung dengan tokoh-tokoh politik, KAMMI justru sebaliknya. Setelah satu bulan pertama KAMMI menegaskan eksistensi gerakannya dalam konstelasi peta aksi demonstrasi mahasiswa di hampir semua kota-kota besar di Indonesia, KAMMI mulai menguatkan posisi dan peran politik gerakannya dengan menggandeng kritis Amin Rais. Sejak terjadinya krisis moneter yang terus meluas menjadi krisis multi dimensi hingga maraknya aksi-aksi demonstrasi mahasiswa, Amin Rais juga menjadi oposisi yang paling efektif pada masa itu.

²⁰ Mahfud Sidiq, *KAMMI dalam Pergulatan Reformasi, Era Intermedia*, Solo 2003. H. 128.

Menurut Andi Rahmat dan M. Najib, pertemuan KAMMI dengan Amin Rais bermula ketika aksi-aksi mulai marak digelar, baik oleh KAMMI maupun mahasiswa yang lainnya. KAMMI melihat bahwa aksi mahasiswa perlu melibatkan kalangan intelektual. Keterlibatan kaum intelektual kritis dapat memberi legitimasi yang lebih kuat terhadap tuntutan reformasi mahasiswa. Ketika dalam reformasi makin menguat, pemerintah mencoba mendeligitimasi aksi-aksi mahasiswa dengan menuduh aksi mahasiswa hanyalah aksi emosional tanpa konsep. Hal ini tentu sangat melecehkan mahasiswa sebagai intelektual muda yang tentunya masih dapat lebih jernih berfikir dari pada orang-orang tua. Karena mahasiswa jelas belum dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan pribadi sebagai orang tua.

Selain itulah KAMMI melihat sosok Amir Rais dengan *track record*-nya sebagai figur paling banyak untuk menjadi lokomotif reformasi. Kemudian Fahri Hamzah, ketua umum KAMMI, mendatangi Amir Rais dan berdiskusi seputar perjuangan reformasi dan meminta Amin Rais berjuang bersama-sama KAMMI. Menanggapi permintaan itu, Amin Rais hanya mengatakan “jika tuntutan KAMMI kurang dari menurunkan Soeharto lebih baik tidak usah mengajak saya”. Lalu Fahri Hamzah memberikan kliping aksi-aksi KAMMI di berbagai daerah sepanjang April 1998, dengan berbagai pandangan dan tuntutan. Setelah berdiskusi panjang, akhirnya Amir Rais menyatakan kesiapan dan kesediaannya bergerak bersama KAMMI memperjuangkan reformasi.

Masih menurut Rahmat dan Najiö, ada beberapa hal yang menyebabkan KAMMI sebagai gerakan mahasiswa dan Amir Rais sebagai tokoh intelektual dapat berjalan bersama. *Pertama*, dorongan atas kesamaan ideologis. Ketika mahasiswa, Amin Rais adalah aktivis mahasiswa Islam. Saat gerakan reformasi berlangsung, jabatannya adalah ketua umum PP Muhammadiyah. Sementara KAMMI merupakan wadah perjuangan yang didirikan oleh aktivis mahasiswa Islam yang dikenal giat dalam berdakwah. Di sinilah komitmen amar makruf nahi munkar yang menjadi sprit perjuangan Amin Rais bertemu dengan komitmen dakwah KAMMI yang mengusung semangat yang sama. *Kedua*, dorongan atas kesamaan isu. Amin Rais dikenal sebagai tokoh intelektual yang paling getol menyuarakan suksesi sebagai jalan keluar dari berbagai kebobrokan yang ditimbulkan oleh kekuatan yang berlangsung lama. Pemikiran tersebut rupanya sejalan dengan apa yang dipikirkan oleh aktivis KAMMI. KAMMI dalam berbagai aksinya menyuarakan perlunya reformasi total, dan mundurnya Soeharto adalah *starting point* dari reformasi total tersebut. Dalam ide inilah Amin Rais dan KAMMI bertemu.²¹

Sejak saat itu pertemuan antar KAMMI dan Amin Rais tidak terjadi hanya pada tataran ide, tetapi bergerak lebih jauh pada aksi-aksi yang diadakan oleh KAMMI. Aksi pertama KAMMI yang dihadiri Amin Rais adalah pada hari Jum'at tanggal 15 Mei 1998 di lapangan masjid Al-Azhar Jakarta. Aksi itu digelar

²¹ Andi Rahmat dan M. Hajib, *Gerakan Perlawanan Dari Masjid Kampus*, Puri Media, Solo 2001. h. 122-127.

menyusul penembakan mahasiswa di Universitas Tri Sakti pada tanggal 12 Mei 1998 yang menyebabkan empat mahasiswa Universitas Tri Sakti gugur. KAMMI menganugerahkan gelar “Pahlawan Reformasi” kepada kelima mahasiswa yang gugur tersebut. Dalam aksi tersebut, Fahri Hamzah secara tegas menuntut pemerintah dan ABRI bertanggungjawab atas peristiwa pembunuhan itu dan bahkan menuntut Soeharto mundur.²² Keterlibatan Amien Rais dalam aksi-aksi KAMMI terus berlanjut hingga pada rencana aksi fenomenal, yaitu Aksi Sejuta Massa Menuntut Reformasi Total pada tanggal 20 Mei 1998 di lapangan Monas, Jakarta.

Sementara itu, presiden Soeharto masih mencoba mencari jalan untuk mempertahankan kekuasaannya. Pada hari yang sama dengan keluarnya ancaman terakhir pimpinan DPR, presiden Soeharto justru menggunakan kekuasaannya untuk membentuk Kabinet Reformasi hasil *reshuffle* dan Komite Reformasi. Rencana itu diumumkan sesuai pertemuan yang dilakukannya dengan sembilan orang okoh masyarakat di Istana Negara. Mereka yang hadir atas undangan presiden waktu itu adalah Nurcholis Madjid (cendikiawan), Yusril Ihza Mahendra (cendikiawan), Emha Ainun Najib (budayawan), Abdur Rahman Wahid (NU), KH. Ali Yafie (NU), Ahmad Bagja (NU), KH. Cholil Badawi (NU), Malik Fajar (Muhammadiyah), dan Sumarsono (Muhammadiyah).

Usai pertemuan itu, Soeharto menyampaikan pidato yang antara lain mengemukakan bahwa sebagai mandataris MPR, dirinya akan memimpin

²² Mahfud Sidiq, *KAMMI Dalam Pergulatan Reformasi*, Era Intermedia, Solo 2003, h. 130

perubahan sesuai tuntutan reformasi secara konstitusional. Menjawab tuntutan agar ia segera mengundurkan diri, Soeharto menyatakan bahwa di tengah kesulitan akibat krisis, tindakan mengundurkan diri baginya merupakan sikap *tinggal pelanggan, colong pelayu* (lari dari tanggungjawab). Namun apa yang terjadi, rencana Soeharto untuk membentuk Kabinet Reformasi dan Komite Reformasi tidak mendapat tanggapan berupa dukungan dan simpati mahasiswa serta tokoh-tokoh kritis.²³

Menurut Adi Suryadi Culla, secara spesifik ada dua masalah penting yang melatarbelakangi mengapa kedua rencana itu gagal direalisasikan.²⁴ **Pertama**, berkaitan dengan pembentukan Komite Reformasi, kegagalan rencana itu adalah terutama diakibatkan penolakan sejumlah tokoh-tokoh kritis yang justru sangat diharapkan Soeharto akan dapat direkrut. **Kedua**, tentang kegagalan pembentukan Kabinet Reformasi, kegagalan dalam hal ini disebabkan terutama adanya pernyataan mendadak melalui surat ketidaksediaan atau pengunduran diri 14 menteri yang berada di bawah pimpinan Menko Ekuin Ginanjar Kartasasmita. Sejumlah tokoh kritis yang hadir dalam pertemuan dengan presiden Soeharto juga menyatakan ketidaksediaannya duduk di dalam Kabinet Reformasi.

Adanya penolakan tokoh kritis dan pengunduran 14 menteri yang sama sekali di luar dugaannya, benar-benar merupakan pukulan telak bagi presiden Soeharto. Tidak mungkin lagi dia dapat bertahan, apalagi dia dihadapkan dengan

²³ Mahfud Sidiq, *Kammi Dalam Pergulatan Reformasi*, Era Intermedia, Solo 2003, h. 141

²⁴ Adi Suryadi Culla, *Patah Tumbuh Hilang Berganti*, Sketsa Pergolakan Mahasiswa Dalam Politik Dan Sejarah Indonesia Tahun 1998-1999, Rajawali Press, Jakarta, h. 187-190

seruan umum dimana-mana agar segera mundur dari jabatannya. Kesempatan terakhir yang digunakan Soeharto untuk berusaha mempertahankan sisa kekuasaannya, dilakukan sekitar pukul 20.00 WIB tanggal 20 Mei 1998, yakni menghubungi Nurcholis Madjid melalui Menteri Agama Quraish Shihab agar bersedia menjadi ketua Komite Reformasi. Nurcholis menolak tegas. Mengomentari penolakan Cak Nur, Soeharto dengan putus asa akhirnya mengatakan "Cak Nur yang moderat saja menolak, tidak ada pilihan lain, kecuali saya mundur".²⁵

Aksi serupa dilakukan KAMMI di berbagai daerah lain secara serentak. Dalam salah satu kalimat orasinya, Fahri Hamzah menyatakan, "Kami akan terus melakukan perubahan, selagi kami mampu. Tak ada yang kami inginkan kecuali perbaikan".²⁶ Bagi organisasi KAMMI dan para aktivitasnya, Soeharto boleh berhenti. Sangat tidak bijaksana apabila menyerahkan proses reformasi begitu saja kepada Habibie. Tekad KAMMI untuk memperjuangkan reformasi total negeri ini sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Indonesia baru yang didambakan oleh seluruh bangsa harus segera tercipta.

²⁵ Mahfud Sidiq, *KAMMI Dalam Pergulatan Reformasi*, Era Intermedia, Solo 2003, h. 142

²⁶ salah satu petikan pernyataan Fahri Hamzah pada rapat akbar KAMMI di lapangan Masjid Al-Azhar Kebayoran Baru Jakarta

BAB IV
ANALISIS IDEOLOGI DAN GERAKAN POLITIK KAMMI
TERHADAP SIYASAH SYAR'IAH

A. Tinjauan Siyasaah Syari'ah Terhadap Corak Idiologi KAMMI

Secara garis besar KAMMI telah menetapkan Islam sebagai idiologinya, selanjutnya diperinci (dipersempit) untuk dijadikan landasan gerakan oprasional meliputi :

1. Kemenangan Islam adalah jiwa perjuangan KAMMI

KAMMI meyakini sepenuhnya sunnah yang telah ditetapkan Allah SWT, bahkan kemenangan Islam adalah suatu kepastian dan sebuah aksioma dalam kamus perjuangan umat. Landasan (dalil) agamanya adalah Al-Qur'an surat Al-Anbiya' ayat 105 yang berbunyi:

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ
الصَّالِحُونَ

"Dan sungguh Telah kami tulis didalam Zabur sesudah (Kami tulis dalam) Lauh Mahfuzh, bahwasanya bumi Ini dipusakai hamba-hambaKu yang saleh".

Selain dalil itu, landasan ideologi pertama yang dijadikan patokan adalah Al-Qur'an surat Al-Mujadilah ayat 21:

كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبُ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

*"Allah Telah menetapkan: "Aku dan rasul-rasul-Ku pasti menang".
Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa".*

Dua landasan itu yang menjadi bahan baku perjuangan KAMMI yang menyatakan di setiap dada ini. Cahayanya tak akan pernah redup, pancarannya menghangatkan jiwa dan benderangnya memerangi langkah demi langkah menuju ridho-Nya, KAMMI yakin bahwa sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Dekat bagi mereka yang mengharapakan pertemuan dengan Allah SWT, dan dekat dengan mereka yang ikhlas.

2. Kebathilan adalah musuh abadi KAMMI

KAMMI meyakini sepenuhnya bahwa kebathilan dengan segala bentuk adalah penyakit yang menyengsarakan umat manusia, oleh karenanya, ia harus diperangi dan dimusuhi. Fitrah manusia sepanjang masa selalu menolak penyakit yang menyengsarakan mereka, namun banyak manusia yang tidak sadar bahkan tidak mengenal penyakit yang diderita atau yang mengancam dirinya, sehingga mereka tidak melakukan pencegahan atau upaya pengobatan. Menjadi masalah KAMMI untuk menyadarkan umat akan hakekat kebathilan karena KAMMI meyakini bahwa mengenal kebathilan adalah bagian dari integritas Islam. KAMMI yakin bahwa Al-Qur'an dan As-Sunnah adalah satu-satunya standon penentu kebenaran dan kebathilan, KAMMI menyatakan perang terhadap segala bentuk kebathilan yang

ditegaskan kitab Allah dan Sunah Rasul. Selama ia menjadi musuh abadi KAMMI sampai tiba saatnya Allah menghancurkan kebathilan itu melalui tangan-tangan para prajurit kebenaran.

3. Solusi Islam adalah tawaran perjuangan KAMMI

KAMMI meyakini bahwa Islam adalah satu-satunya jalan yang mengantarkan perjuangan umat ini kepada kebahagiaan. Islam adalah titik tolak perjuangan, metode dan jalan, sebagaimana ia adalah tujuan. KAMMI meyakini sepenuhnya bahwa hanya Islam yang mampu mengembalikan kemanusiaan manusia, menyeimbangkan antara ruh dan jasad, memadukan antar jasmani, akal dan rohani, dan membawa manusia menuju keutuhan peradaban.

Landasan dari rumusan ideologi ini adalah Al-Qur'an surat Al-Anbiya' ayat 10 yang berbunyi:

لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

"Sesungguhnya Telah kami turunkan kepada kamu sebuah Kitab yang di dalamnya terdapat sebab-sebab kemuliaan bagimu. Maka apakah kamu tiada memahaminya?"

4. Perbaikan adalah tradisi perjuangan KAMMI

KAMMI selalu melandasi gerakannya pada prinsip istilah (perbaikan) mulai dari perbaikan individu, keluarga, masyarakat, sampai perbaikan bangsa dan negara. Sedapat mungkin KAMMI menghindari gerakan atau aktifitas

yang membawa kerusakan meskipun ada manfaat yang diperoleh darinya. KAMMI berprinsip menghindari kerusakan lebih diutamakan dari pada mengambil manfaat.

Islam sebagai azas KAMMI mewajibkan umat untuk menjaga lima penopang hidup manusia, yaitu agama, akal, jiwa, kehormatan, dan benda. Oleh karena itu, seluruh gerak dan aktivitas KAMMI senantiasa berorientasi pada perbaikan dan pemeliharaan lima hal tersebut sebagaimana KAMMI akan memerangi setiap upaya untuk merusaknya. Untuk merealisasikan semua itu, KAMMI berpegang teguh pada syri'at Islam, sebab disanalah sumber kebaikan, sebagaimana KAMMI berpegang teguh pada prinsip dakwah islamiyah sebagai metode perbaikan. KAMMI berusaha untuk memelihara dan menghidupkan tradisi perbaikan ini, karena ia adalah tradisi para Nabi dan Rasul.

5. Kepemimpinan umat adalah strategi perjuangan KAMMI

KAMMI yakin bahwa negeri ini akan bahagia ketika nilai-nilai Islam mewarnai kehidupan masyarakat di saat *amar ma'ruf nahi munkar* ditegakkan. Semua itu akan terwujud dengan baik manakala umat Islam berperan memimpin negeri ini, sebab keshalihan masyarakat lebih terjaga bila keshalihan pemimpin terwujud sebagaimana keshalihan pemimpin lebih terjamin jika terdapat kontrol dan masyarakat yang shalih. Sekali lagi KAMMI meyakini hanya Islam yang mampu melahirkan keshalihan itu.

Landasan dari rumusan ideologi ini adalah firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 143:

وَكذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

“Dan demikian (pula) kami Telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu”.

6. Persaudaraan adalah watak muamalah KAMMI

KAMMI senantiasa menjalin persaudaraan dengan komponen masyarakat yang, memiliki visi perbaikan untuk bangsa ini, karena KAMMI yakin bahwa upaya membangun bangsa ini tidak mungkin terwujud jika hanya dilakukan oleh sekelompok anak bangsa tanpa melibatkan yang lain. Sementara, kerjasama dalam hal ini membutuhkan jiwa persaudaraan, dengan sesama muslim dan organisasi Islam, KAMMI berpegang teguh pada firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ.....

“Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu”

Dengan rumusan ideologi tersebut, jangka panjang perjuangan KAMMI juga tidak luput dari cita-cita terwujudnya sebuah tatanan

masyarakat Islami. Tatanan masyarakat itu juga bisa berupa bentuk sebuah pemerintahan (kepemimpinan) Islam atau bentuk negara Islam.

Ideologi tersebut di atas dirumuskan setelah KAMMI mengubah dirinya menjadi Ormas lewat Muktamarnya yang pertama, pada tanggal 1-4 Oktober 1998 di Bekasi, Jawa Barat. Sepintas, kalau dicermati, rumusan ideologi KAMMI tersebut mempunyai kemiripan dengan ideologi perjuangan yang dimiliki Ikhwanul Muslimin.

Ideologi perjuangan Ikhwanul Muslimin, sebagaimana dirumuskan oleh pendirinya, Hasan Al-Banna, dan kerap diperdengarkan oleh tokoh-tokoh gerakan dakwah ini di Indonesia; terumuskan dalam slogan berikut: Allah Tujuan Kami (*Allah Ghoyatuna*), Rasul (*Muhammad*) Teladan Kami (*Ar-Rasul Qudwatuna*), Jihad Jalan Perjuangan Kami (*Al-Jihad Sabiluna*), Mati Syahid di Jalan Allah Cita-Cita Kami (*Asy-Syahadah Umniyatuna*).

Pilihan kata dan bentuk slogan yang digunakan, meski tidak terlalu mirip, menunjukkan kesamaan ideologis itu. Platform ideologis semacam itu sebelumnya tidak pernah dimiliki oleh organisasi Islam manapun. Uraian yang lebih ideologis dapat kita temukan dalam penjelasan dari slogan-slogan ideologis KAMMI itu. Nampak jelas, bahwa KAMMI muncul sebagai sebuah representasi perjuangan yang ingin mengusung nilai-nilai ideologis yang kental sebagai karakteristik para aktivis gerakan dakwah kampus ini sejak lama, namun pada saat yang bersamaan, juga ingin tetap tampil sebagai

kekuatan sosial, khususnya di tengah-tengah massa mahasiswa dengan karakteristik tersendiri.

Dalam kaitan itu, KAMMI menerjemahkan misi perjuangan secara lebih membumi, dan lebih dekat dengan lingkup aktivitas yang selama ini dikerjakannya, yang tergambarkan dalam; **pertama**, menjadi pelopor, perekat dan pemercepat proses perubahan; **kedua**, memberikan pelayanan sosial; **ketiga**, melakukan pendidikan politik bagi masyarakat.

Misi tersebut menegaskan bagaimana KAMMI, dengan spirit ideologisnya yang kental, ingin memasuki ranah yang lebih obyektif dalam kehidupan sosial politik masyarakat, khususnya dalam bingkai dinamika gerakan mahasiswa. Pilihan tersebut harus dilakukan mengingat KAMMI, meski didukung oleh seluruh komponen aktivitas gerakan dakwah (*tarbiyah*) ini, dia hanyalah sebuah gerakan mahasiswa, yang mempunyai keterbatasan-keterbatasan tertentu dalam mengemban aktivitasnya. Pada akhirnya, sebagaimana juga berbagai lembaga, yayasan, dan industri yang diproduksi oleh jma'ah gerakan dakwah ini, KAMMI adalah salah satu diantaranya. KAMMI dapat dikatakan sebagai salah satu asosiasi dari sebuah *society* yang bernama gerakan dakwah kampus atau gerakan *tarbiyah*.

Bedanya, dalam waktu tertentu KAMMI menjadi representasi utama dari aspirasi kelompok dakwah ini, khususnya beberapa saat menjelang dan setelah Soeharto lengser, sebelum didirikan partai keadilan.

B. Tinjauan Siyasah Syari'ah Terhadap Politik Kammi Di Unesa

Dalam karakter pergerakan KAMMI menegaskan Bahwa dirinya sebagai organisasi gerakan yaitu suatu kekuatan yang terorganisir secara terus menerus bekerja memperjuangkan cita-citanya bagi kepentingan bangsa dan Negara berkenan dengan karaktersebut :

1. *Gerakan Tauhid*, yaitu eksistensi KAMMI yang seluruh aktivitasnya dan kiprahnya dalam perjuangan membangun masyarakat madani, meliputi; (a) Gerakan pembebasan manusia dari segala bentuk penyembuhan selain kepada Allah SWT, (b) Pendeklarasian tata sosial masyarakat Islamiyah sebagai antitesa terhadap tata soaial jahiliyah materialisme.
2. *Gerakan Intelektual*, yaitu peran-peran yang dijalankan KAMMI berdasarkan pada kekuatan aspek keilmuan dan intelektualisme, sehingga menjadi gerakan yang rasional dan selalu moderat. Hal ini meliputi; (a) Pengembalian nilai-nilai saintifik Islam dengan melakukan interpretasi Islam secara kreatif, proporsional, dan kontekstual, (b) Melakukan pengajian Islam mulai dari berbagai sudut pandang disiplin ilmu, dan (c) Melakukan integrasi ilmu secara teoritis dalam sistem keislaman.
3. *Gerakan Sosial Mandiri*, yaitu keberadaan KAMMI harus menjadi bagian utuh dari masyarakat dan dirasakan manfaat kehadirannya secara langsung. Ini menyangkut komitmen terhadap solidaritas sosial dan pengabdian sosial yang meliputi; (a) Mendirikan bangunan jaringan dan pengelolaan potensi ekonomi umat, (b) Memberikan pendidikan masyarakat, dan (c) Melakukan

pendampingan dan pemberdayaan masyarakat untuk mempresentasikan Islam sebagai *rahmatan lil 'alamin*.

4. *Gerakan Politik Ekstra Parlemen*, sebagai gerakan berbasis moral intelektual, KAMMI juga memosisikan dirinya sebagai kekuatan ekstra parlemen untuk berperan sebagai salah satu kekuatan kontrol sosial terhadap kekuasaan. Akan tetapi KAMMI juga membuka jalan untuk melakukan perubahan dari dalam sistem, dengan mentransformasikan kader-kader kepemimpinannya ke tengah-tengah masyarakat dan negara pada tahap lanjutan perjuangannya. Sebagai gerakan politik ekstra parlemen, peran KAMMI meliputi; (a) Mempengaruhi dan berupaya berpartisipasi dalam pengambilan kebijakan publik, (b) Mengawasi dan memantau pelaksanaan kebijakan publik, (c) Memberikan penilaian dan advokasi terhadap pelaksanaan publik.

Dari paradigma gerakan yang digariskan KAMMI, terlihat potret organisasinya yang mencakup sejumlah aspek secara bersamaan. Paradigma ini menegaskan bahwa KAMMI adalah suatu organisasi gerakan moral-keagamaan, intelektual dan keilmuan, politik dan juga sosial yang bekerja untuk membangun masyarakat madani dan ikut memerankan fungsi kepemimpinan di dalamnya.

Dalam paradigma diatas, terlihat organisasi yang mencakup sejumlah aspek secara kebersamaan. Untuk itu paradigma ini menegaskan bahwa KAMMI juga sosial yang bekerja untuk membangun masyarakat yang madani serta memerankan fungsi kepemimpinan di dalamnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Corak ideologi dan gerakan politik KAMMI di UNESA sebagai organ perjuangan mahasiswa, idealisme KAMMI di tuangkan dalam visi dan misi organisasi, bahwa KAMMI adalah wadah perjuangan permanen yang akan melahirkan kader-kader pemimpin masa depan yang tangguh dalam upaya mewujudkan masyarakat Islam di Indonesia, dan menurut KAMMI, masyarakat madani merupakan suatu bentuk masyarakat ideal yang mesti di wujudkan juga di Indonesia.
2. Deskripsi Siyasa dalam gerakan politik KAMMI di UNESA, ini sangat jelas bahwa KAMMI meyakini sepenuhnya hukum yang ditetapkan Allah SWT, bahwa kemenangan Islam adalah suatu kepastian dan sebuah aksioma dalam kamus perjuangan umat. Untuk itu KAMMI juga meyakini bahwa sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat bagi mereka yang berjihad dan berkorban dengan ikhlas.
3. Ideologi dan gerakan politik KAMMI di UNESA dalam politik Islam di Indonesia ini mewujudkan bahwa gerakan reformasi mampu memberikan efektivitas tekanan dan ketepatan gagasannya untuk menggerakkan reformasi maupun pemerintahan supaya bisa berjalan dengan benar dan tepat, dan misi KAMMI yang pertama, menjadikan pelopor, perekat; untuk proses perubahan

dan. yang kedua, memberikan pelayanan. dan yang ketiga, memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari pembahasan tentang masalah ini, maka penelitian memberikan beberapa saran antara lain:

- a. Kepada KAMMI kami sarankan untuk tetap memperhatikan kondisi ranah perpolitikan di Indonesia terutama dalam pergerakan di bidang pembaharuan Islam dan pendidikan.
- b. Hendaknya kepada segenap pembaca dan penelaah skripsi untuk lebih hati-hati dalam menganalisa sebuah pemikiran-pemikiran tentang sebuah pergerakan di dalam perpolitikan.

DAFTAR PUSTAKA

Ali Said Damanik, *Fenomena Partai Keadilan Transformasi, 20 TH Gerakan Tarbiah*
Indonewsia, Jakarta: Terahu, 2002

Ali Ahmad al-Nadwi, *Al-Qowaid Al-Fiqhiyah*, Damasqus: Dar Al-Qalam,

Abdul Aziz Hannafi, Tarbiyah ej. Blog Spot. Com/2006/01/Siyasah Syar'iyah dan
Pelaksanaannya

Culla, Adi Suryadi *Patah Tumbuh Hilang Berganti, Sketsa Pergolakan Mahasiswa Dalam*
Politik Dan Sejarah Indonesia Tahun, Jakarta: Rajawali Press, 1998-1999

Djazuli, A. *Fiqih Siyasah*, Bogor: Prenada Media, 2003

Eep Saefullah Fatah, *Catatan Atas Gagalnya Politik Orede Baru*, Yogyakarta, 1998

Harahap Muchtar, *Gerakan Mahasiswa dan Politik Indonesia*, Jakarta: 1999

Hikam, Muhammad As, *Demokrasi dan civil Sociaeti*, Jakarta: PA3ES, 1996

Khallaf, Abdul Wahab, *Al-Syisah al-Syariah*, Kairo: Dar al-Ashar, 1977

Kuntowijoyo, *Paradigma Islam; interpretasi Untuk Aksi*, Bandung: Mizan, 1993

Ma'arif, Ahmad Syafi'i, *Islam dan Masalah Kenegaraan*, Jakarta: LP3ES

Mahfud Sidiq, *KAMMI dan Pergulatan Reformasi*, Solo: Era Intermedia, 2003

Muchlis Usman, *Kaidah Kaidah Ushuliyah Dan Fiqhiyah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, Jakarta: Radar Jaya Pratama, 2001

Prasetyantoko, *Gerakan Mahasiswa dan Demokrasi di Indonesia*, Jakarta: 2001

Pulungan, J Suyuti, *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah Dan Pemikiran*, Jakarta: Rajawali Press, 1997

Rahmat, Andi dan Najib, Muhammad, *Gerakan Perlawanan Dari Masjid Kampus*, Surakarta: Puri Media, 2001

Ash-Siddieqy, T .M. Hasbi *Pengantar Siyasah Syar'iyah*, Yogyakarta: Madah, 1975

Sjadzali , Munawir, *Islam Dan Tat Negara Dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press, 1991

Sukardja, Ahmad, *Piagam Madinah Dan Undang-Undang 1945*, Jakarta: UI Press, 1995

www.goecities.com/collegetpark/campus/8690/Artikel/Siasah